

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

20  
25



## KATA PENGANTAR

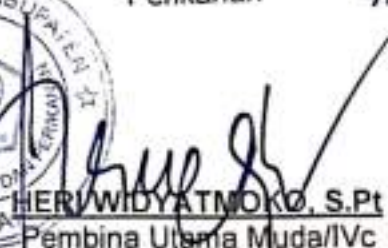
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar bisa menjadi tolak ukur dalam membuat perencanaan pada tahun berikutnya. Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 30 Januari 2026  
Kepala Dinas Peternakan dan  
Perikanan



  
HERI WIDYATMOKO, S.Pt  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 197201151998031006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### A. Ringkasan Capaian Kinerja: Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Persentase Realisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. LKjIP ini memuat hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Penyusunan LKjIP diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil, terukur, dan selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Dalam kerangka tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang mendukung visi pembangunan Kabupaten Blitar “**Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya**”. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan misi 2 (dua) pembangunan daerah “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri.” Pelaksanaan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan serta diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan yang diukur melalui indikator persentase peningkatan produksi perikanan menunjukkan

capaian rata-rata sebesar -1119%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam produksi perikanan tangkap dengan capaian -3360%, yang dipicu oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan dinamika perairan. Meskipun demikian, nilai produksi perikanan tangkap menunjukkan angka kenaikan dibandingkan tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap masih memiliki kontribusi ekonomi yang positif. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) tahun terakhir terdapat pola perubahan pola tangkapan nelayan yang memilih untuk menangkap jenis ikan yang bertonase rendah tetapi memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, subsektor perikanan budidaya, baik konsumsi maupun nonkonsumsi telah mencapai target dengan capaian masing-masing 100%.

2. Sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 137%. Indikator produksi komoditas peternakan berhasil melampaui target, dengan capaian produksi daging sebesar 147%, telur 170%, dan susu 310%. Selain itu, indikator persentase produk peternakan yang layak edar mencapai 100,1%, serta indikator persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) mencapai 103,1%, yang menunjukkan efektivitas pengendalian mutu dan kesehatan hewan.
3. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator Nilai SAKIP perangkat daerah, dengan capaian sebesar 107% dari target yang ditetapkan. Capaian ini berada pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan telah berjalan secara efektif dan akuntabel.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 tercatat sebesar -2,9 persen dan berada pada kategori sangat rendah, yang disebabkan oleh rendahnya capaian kinerja pada sektor

perikanan tangkap yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keseluruhan perangkat daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah menunjukkan kinerja yang sangat baik pada sektor peternakan dan tata kelola kinerja, namun masih menghadapi tantangan besar pada sektor perikanan tangkap yang disebabkan cuaca. Oleh karena itu, pada periode berikutnya diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap faktor lingkungan dan iklim guna mendorong pemulihan dan peningkatan kinerja subsektor perikanan secara berkelanjutan.

## **B. Ringkasan Kendala dan Langkah Kedepan**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, kendala utama yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terpusat pada sektor perikanan tangkap, yang berdampak signifikan terhadap kinerja keseluruhan perangkat daerah. Adapun kendala pokok yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dampak cuaca ekstrem dan dinamika iklim, yang menyebabkan berkurangnya hari melaut, menurunnya hasil tangkapan, serta meningkatnya risiko keselamatan nelayan.
2. Ketergantungan tinggi terhadap kondisi alam, sehingga produksi perikanan tangkap sulit dikendalikan secara optimal
3. Perubahan pola tangkapan nelayan, 2 (dua) tahun terakhir nelayan lebih banyak berfokus pada ikan layur, yaitu jenis ikan dengan volume atau tonase relatif rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar pada tahun berikutnya, khususnya dalam rangka memperbaiki capaian sektor perikanan serta mempertahankan kinerja sektor peternakan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi usaha nelayan
2. Penguatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya, melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan kelembagaan.
3. Peningkatan kualitas data dan sistem monitoring produksi perikanan, agar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja sektor peternakan, khususnya dalam pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan peningkatan produksi komoditas peternakan.
5. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis SAKIP agar kinerja organisasi semakin terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSKLUSIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	4
C. Dasar Hukum .....	15
D. Sistematika Dokumen .....	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	18
A. Perjanjian Kinerja 2025.....	18
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025 .....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Pengukuran Kinerja .....	23
B. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Realisasi Anggaran.....	97
BAB IV. PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Rencana Tindak Lanjut .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASN Dinas Peternakan dan Perikanan .....	4
Tabel 1.2 Isu Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan .....	5
Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama .....	14
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	19
Tabel 2.3 Rincian Anggaran Tahun 2025 .....	21
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 .....	24
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan .....	25
Tabel 3.3 Perkembangan Kinerja Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 .....	28
Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan .....	28
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026 .....	29
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029 .....	29
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil di Tingkat Provinsi Jawa Timur/Kota Tetangga .....	30
Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan .....	32
Tabel 3.9 Jumlah Nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang Difasilitasi Pengelolaan Penangkapan Ikan .....	37
Tabel 3.10 Rincian Jumlah Nelayan Kecil yang Diberdayakan .....	38
Tabel 3.11 Rincian Jumlah Kapal Perikanan yang Didaftar .....	39
Tabel 3.12 Data Jumlah Pembudidaya Ikan yang Diberdayakan .....	41

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan .....	46
Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 .....	53
Tabel 3.15 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025.....	54
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026 .....	54
Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 .....	56
Tabel 3.18 Capaian Produksi Daging .....	58
Tabel 3.19 Capaian Produksi Telur.....	58
Tabel 3.20 Capaian Produksi Susu.....	59
Tabel 3.21 Wilayah Tidak Terkendali PHMS 2025 .....	60
Tabel 3.22 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 .....	61
Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029.....	61
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pro duksi dan Kualitas Produk Peternakan di Tingkat Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga .....	62
Tabel 3.25 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan...	66
Tabel 3.26 Rincian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Desa/Kecamatan .....	80
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran	

Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan...	81
Tabel 3.28 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah sesuai Perjanjian Kinerja 2025 .....	88
Tabel 3.29 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah sesuai Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan.....	88
Tabel 3.30 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah sesuai Perjanjian Kinerja 2025..	89
Tabel 3.31 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan .....	89
Tabel 3.32 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026 .....	90
Tabel 3.33 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029 .....	90
Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Kota Tetangga .....	90
Tabel 3.35 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja .....	91
Tabel 3.36 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	96
Tabel 3.37 Realisasi Keuangan .....	100
Tabel 4.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	103
Tabel 4.2 Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja .....	103
Tabel 4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	3
Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Tujuan dan Sasaran .....	15
Gambar 3.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap .....	26
Gambar 3.2 Capaian Produksi Perikanan Konsumsi .....	28
Gambar 3.3 Capaian Produksi Perikanan Non Konsumsi .....	28
Gambar 3.4 Restocking Ikan PUD .....	38
Gambar 3.5 Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok .....	43
Gambar 3.6 Capaian Produksi PUD .....	43
Gambar 3.7 Persentase Pengolahan dan Pemasaran Perikanan .....	44
Gambar 3.8 Edukasi Gemarikan Tahun 2025 .....	46
Gambar 3.9 Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak .....	71
Gambar 3.10 <i>Outing Class</i> Edukasi Peternakan .....	72
Gambar 3.11 Capaian Pengawasan Bahan Pakan Ternak .....	73
Gambar 3.12 Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi .....	74
Gambar 3.13 Capaian Jasa Pelayanan Laboratorium .....	77

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan rencana dan program kerja Dinas;
2. Pelaksanaan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan perencanaan dinas serta rumah tangga dinas;
3. Pengawasan penggunaan sarana peternakan dan perikanan;
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan *sustainable development goals* hewan di Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
7. Pelaksanaan koordinasi pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah;

8. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang bersumber dari daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Pelaksanaan koordinasi pengembangan prasarana peternakan, lahan penggembalaan umum;
10. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (*zoonosis*) di Daerah;
12. Pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium bidang peternakan dan perikanan serta jasa medik veteriner di Daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan persyaratan dan pembinaan persyaratan teknis *hygiene* sanitasi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
14. Pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit hewan dan bencana alam yang berakibat pada hewan;
15. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kegiatan izin usaha peternakan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan serta izin usaha pengecer obat hewan, surat keterangan kesehatan hewan dan produk asal hewan;
16. Pelaksanaan validasi bahan dan menetapkan kebijakan kenelayanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap, usaha kecil pembudidayaan ikan, fasilitasi perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
17. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan kenelayanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

18. Penetapan dan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
19. Penetapan kebijakan fasilitasi pengelolaan, mutu, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
20. Pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi program kerja dan kegiatan Dinas;
21. Pelaksanaan fasilitasi program pemerintah pusat dan provinsi terkait bidang peternakan dan perikanan; dan
22. Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain terkait bidang peternakan dan perikanan yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 120 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	4 Orang
4	Pelaksana	15 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	3 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	25 Orang
6	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	7 Orang
7	Jabatan Fungsional Penyelia	1 Orang
8	Jabatan Fungsional Mahir	2 Orang
9	Jabatan Fungsional Terampil	5 Orang
10	PPPK	19 Orang
11	PPPK Paruh Waktu	33 Orang
	<b>Total</b>	<b>120 Orang</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

## B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke 2 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri”, Sasaran ke 6 yaitu Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan, dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah

sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.2  
Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Fluktuasi produksi perikanan tangkap akibat perubahan cuaca ekstrem	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap
Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Belum optimalnya pemberdayaan nelayan kecil akibat kurangnya pendampingan yang	Tingkat kemiskinan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pelatihan (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan yang	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	berkelanjutan, serta keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap		memperebutkan SDA			
Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Kurang memadai infrastuktur penangkapan laut (jumlah dan kapasitas pelabuhan	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	<b>Persaingan Sumber Daya Alam</b> Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	an yang masih kurang)		memperebutkan SDA			
Potensi sumber daya perikanan budidaya di perairan wilayah kabupaten	Belum optimalnya produksi perikanan konsumsi, produksi cenderung mengalami titik jenuh	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan pembudidaya ikan dan optimalisasi produksi pakan mandiri
Kabupaten Blitar dikenal sebagai sentra budidaya ikan hias, khususnya ikan koi	Produksi perikanan non konsumsi/hias cenderung mengalami penurunan	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan daya saing produk ikan hias melalui promosi, digitalisasi pemasaran, dan peningkatan kualitas produksi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya perairan umum (sungai, waduk)	Penurunan jumlah stok ikan karena adanya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Penguatan kelembagaan nelayan dan penataan izin di wilayah perairan darat	Peningkatan pengawasan perikanan
Potensi perikanan budidaya air tawar dan perikanan tangkap di Kabupaten Blitar cukup besar	Produk olahan hasil perikanan masih rendah, pemasaran belum menjangkau wilayah luas	Mulai bergesernya struktur perekonomian dari pertanian ke industri pengolahan, perdagangan dan jasa (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Hilirisasi perikanan dan penguatan akses pasar hasil perikanan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Blitar sebagai sentra produsen telur	Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging)	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan rantai pasok produk peternakan
Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif		Ancaman wabah penyakit hewan lintas negara	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	maupun kuratifnya					
Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Pengelolaan limbah peternakan belum optimal sehingga memerlukan	Bau limbah/kotoran ternak dan peningkatan populasi lalat akibat usaha peternakan yang tidak dikelola dengan baik (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Pengelolaan Limbah Peternakan yang Berkelanjutan
Kabupaten Blitar sebagai pemasok telur tertinggi di Jawa Timur	Kurangnya pasokan jagung untuk pakan ternak	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing)

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Keterse diakan pakan yang masih banyak tergantung pabrikannya sehingga pakan masih mahal	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	an Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing)
Distribusi PDRB sub sektor peternakan cukup besar dengan nilai 12,4%	Hilirisasi produk peternakan belum berkembang	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Hilirisasi peternakan dan pengembangan kapasitas peternak

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Peternakan dan Perikanan” dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, meningkatnya produksi hasil perikanan dan meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan

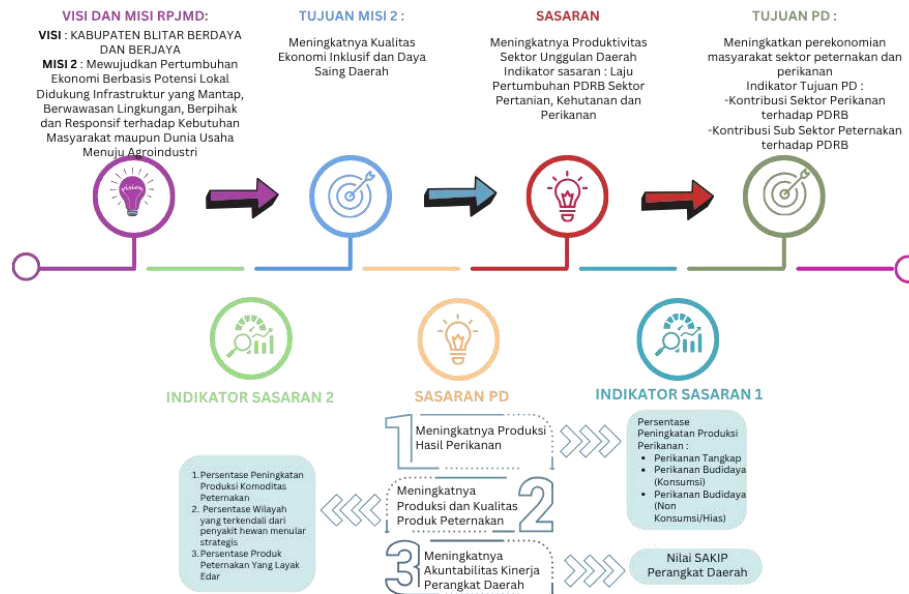
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah
2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan Tangkap</li> <li>- Perikanan Budidaya (konsumsi)</li> <li>- Perikanan Budidaya (non konsumsi)</li> </ul>
3	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daging</li> <li>- Telur</li> <li>- Susu</li> </ul>
		Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
		Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

*Logical Framework* keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam sebagai berikut:

## KERANGKA KETERKAITAN

SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN  
RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Tujuan&Sasaran dengan RPJMD

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
  9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
  10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);

11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

#### **D. Sistematika Dokumen**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

##### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	0,1
2	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produktifitas ternak	0,5
		Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	98,2
		Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	92
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	75/BB

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	
		- Perikanan tangkap	0,5
		- Perikanan budidaya (konsumsi)	2,5
		- Perikanan budidaya (non konsumsi)	0,1
2	Meningkatnya produksi dan kualitas produk dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	
		- Daging	3,95
		- Telur	3,4
		- Susu	1,4
		Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98
		Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	93

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Angka)	73,6

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, yang disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan, sasaran pembangunan daerah, serta dinamika kebutuhan sektor peternakan dan perikanan pada periode perencanaan yang berjalan.

Pada sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan, sebelumnya indikator masih bersifat umum dengan satu indikator persentase peningkatan produksi perikanan. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan, indikator tersebut diuraikan lebih rinci menjadi perikanan tangkap, perikanan budidaya konsumsi, dan perikanan budidaya non konsumsi, masing-masing dengan target yang lebih spesifik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kinerja dan memudahkan pengendalian serta evaluasi capaian pada masing-masing subsektor.

Pada sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan, terjadi perubahan dari indikator yang semula berbasis persentase peningkatan produktivitas ternak menjadi indikator persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang dirinci menurut komoditas utama, yaitu daging, telur, dan susu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pendekatan Renstra baru yang lebih menekankan pada hasil komoditas strategis, sehingga kinerja dapat diukur secara lebih konkret dan relevan terhadap kebutuhan pasar serta ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tetap konsisten, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan serta prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang baru.

## B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.436.742.843,00,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 81.397.200,-
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 251.412.200,-
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.729.900,-
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 20.731.150,-
2	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 456.460.975,-
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 263.758.050,-
		Program Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 351.755.925,-
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 1.800.000,-
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 2.999.900,-

		Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 173.682.200,-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.829.015.343,-
Total Anggaran			<b>Rp. 12.436.742.843,00</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### B. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025 :

##### 1. Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu persentase peningkatan produksi perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap,

perikanan budidaya (konsumsi) dan perikanan budidaya (non konsumsi) dengan definisi sebagai berikut:

- a) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap  
Merupakan tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya.
- b) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (konsumsi)  
Merupakan tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.
- c) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (non konsumsi)  
Merupakan tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan berdasarkan perjanjian kinerja 2025 adalah sebesar -7,08% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.1  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,1	-7,08	-7080
Capaian Kinerja Sasaran					-7080%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 adalah sebesar -1119% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan  
berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)			
		1. Perikanan tangkap	0,5	-16,8	-3.360%
		2. Perikanan budidaya (konsumsi)	2,5	2,5	100%
		3. Perikanan budidaya (non konsumsi)	0,1	0,1	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					-1119%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama persentase peningkatan produksi perikanan tangkap terealisasi dengan capaian -3660% dengan target peningkatan sebesar 0,5% dengan realisasi sebesar -16,8%. Dengan target peningkatan sebesar 0,5%, realisasi produksi perikanan tangkap justru mengalami penurunan sebesar 16,8%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar -3.360%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja belum tercapai dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca. Sedangkan untuk persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (konsumsi) dan perikanan budidaya (non konsumsi) dapat tercapai sesuai dengan target.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan menunjukkan kinerja yang fluktuatif apabila dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Capaian yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing subsektor perikanan serta faktor eksternal dan internal yang memengaruhi proses produksi.

a) Produksi perikanan tangkap

Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan pada tahun 2024 terjadi cuaca

ekstrem yang mengakibatkan penurunan produksi ikan laut. Sedangkan pada tahun 2025, produksi perikanan tangkap kembali mengalami penurunan karena adanya kemarau basah di sepanjang tahun 2025. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yang sangat tajam karena adanya fenomena *El-Nino*, kemarau panjang sangat mendukung kegiatan nelayan untuk melaut sehingga produksi perikanan tangkap sangat melimpah.



Gambar 3.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Selain itu di tahun 2024 dan 2025 menurunnya produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh perubahan pola tangkapan nelayan yang lebih banyak berfokus pada ikan layur, yaitu jenis ikan dengan volume atau tonase relatif rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga, meskipun secara kuantitas produksi perikanan tangkap mengalami penurunan, nilai produksi perikanan tangkap justru cenderung meningkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 dimana jika dibandingkan dengan tahun 2023 saat produksi ikan tangkap mencapai

3.545,3 ton nilai produksi hanya mencapai Rp45.799.202.000. Sementara itu, pada Tahun 2025 produksi menurun menjadi 2.571,7 ton, namun nilai produksinya justru meningkat menjadi Rp57.815.071.200. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap masih memiliki kontribusi ekonomi yang positif, meskipun terdapat perubahan komposisi jenis hasil tangkapan.

b) Produksi perikanan budidaya (konsumsi)

Kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya konsumsi pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang stabil dengan realisasi sebesar 2,5%, sama dengan target yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2,3%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 2,8%. Adanya peningkatan produksi perikanan konsumsi dan tercapainya target produksi perikanan konsumsi di Kabupaten Blitar ini dipengaruhi adanya peningkatan permintaan pasar akan ikan konsumsi. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak positif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong kebutuhan sumber protein hewani, termasuk ikan. Program tersebut memberikan peluang pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi para pembudidaya ikan, sehingga memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kapasitas produksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi di Kabupaten Blitar. Capaian produksi perikanan budidaya konsumsi sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 3.2 Capaian produksi perikanan konsumsi

c) Produksi perikanan budidaya (non konsumsi)

Realisasi kinerja perikanan budidaya non konsumsi pada tahun 2025 tercapai sebesar 0,1%, sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dengan angka lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 0,02%, namun masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,4%. Peningkatan dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas usaha ikan hias dan komoditas non konsumsi lainnya. Capaian produksi perikanan budidaya konsumsi sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 3.3 Capaian produksi perikanan non konsumsi

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 :

Tabel 3.3  
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,1	-7,08	-5,77%	72,71%

Tabel 3.4  
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Berdasarkan Kinerja 2025 Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)				
		1.Perikanan Tangkap	0,5	(16,8)	(12,7)	143
		2.Perikanan Budidaya (konsumsi)	2,5	2,5	2,3	2,8
		3.Perikanan budidaya (non konsumsi)	0,1	0,1	0,02	0,4

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Selain itu, capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya produksi hasil perikanan tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode renstra 2021-2026 dan awal dari periode Renstra 2025-2029, yang menunjukkan angka bervariasi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Capaian produksi perikanan budidaya menunjukkan tren positif dibandingkan produksi perikanan tangkap. Dengan mempertimbangkan karakteristik perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, capaian ini menjadi tantangan utama dalam upaya pencapaian target akhir renstra. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.5  
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,1	-7,08	-7080%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 3.6  
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)			
		1.Perikanan Tangkap	0,5	-16,8	-3.360%
		2.Perikanan Budidaya (konsumsi)	2,5	2,5	100%
		3.Perikanan budidaya (non konsumsi)	0,1	0,1	100%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar, maka untuk capaian perikanan tangkap lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan capaian peningkatan produksi perikanan budidaya (konsumsi) jika dibandingkan dengan Kota Blitar lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Kota Tetangga

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan di tingkat Provinsi Jawa Timur/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)		
		1.Perikanan Tangkap	-16,8	-2,7 (Provinsi Jawa Timur)
		2.Perikanan Budidaya (konsumsi)	2,5	0,83 (Kota Blitar)
		3.Perikanan budidaya (non konsumsi/hias)	0,1	0,3 (Kota Blitar)

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan dari indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan yaitu:

**1) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**

- a) Pemberdayaan nelayan kecil, dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengembangan garam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong peningkatan volume dan kualitas hasil tangkapan.
- b) Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kepatuhan terhadap perizinan, serta pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.

- c) Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui pembinaan pelaku usaha pengolahan, dan penguatan akses pasar. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperluas jangkauan pemasaran sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan pelaku usaha perikanan.

## **2) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Konsumsi dan Non Konsumsi)**

- a) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil

Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dilakukan melalui fasilitasi sarana produksi budidaya, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya serta meningkatkan kualitas hasil produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha pembudidaya

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan adalah sebagai berikut:

### **1) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**

- a) Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim yang tidak menentu, yang ditandai

dengan meningkatnya intensitas gelombang laut, perubahan pola musim, serta ketidakpastian waktu melaut, sehingga sering menghambat aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan berdampak langsung terhadap penurunan hasil tangkapan serta volume produksi perikanan tangkap.

- b) Masih adanya praktik *illegal fishing* di Perairan Umum Darat (PUD), seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan merusak ekosistem perairan, sehingga berdampak pada penurunan volume atau produksi ikan di PUD (Perairan Umum Darat).

## 2) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Konsumsi dan Non Konsumsi)

- a) Harga pakan ikan yang relatif tinggi, khususnya pakan pabrikan, menyebabkan meningkatnya biaya produksi dalam usaha perikanan budidaya, sehingga berpotensi menurunkan keuntungan pembudidaya ikan

Dalam menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dan Kegagalan dalam Sasaran  
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya produksi hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.571,7 Ton	
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan	Jumlah nelayan PUD	34 nelayan	Fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan melalui restocking mendukung

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/ Kota	yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan		produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Darat (PUD)
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	74 nelayan	Pemberdayaan meningkatkan kemampuan teknis dan akses sarana usaha nelayan kecil, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	1.225,7 Ton	Optimalnya fungsi TPI sebagai pusat pelelangan meningkatkan penyerapan dan distribusi hasil tangkapan, sehingga nelayan terdorong meningkatkan volume produksi.
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	36 unit kapal	Legalitas kapal meningkatkan kepastian usaha dan intensitas aktivitas melaut, sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	17.736,425 ton	
			Perikanan Non Konsumsi / Hias	205.230.494 ekor	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi daya Ikan Kecil yang diberdayakan	125 pembudidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil meningkatkan kemampuan pembudidaya, sehingga mendorong peningkatan produksi ikan budidaya.
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	5 jenis pengelolaan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Prosentase Peningkatan produksi PUD	-5,1%	
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	24 orang	Pengawasan mencegah praktik penangkapan yang merusak dan ilegal, sehingga menjaga

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	n Yang diawasi		ketersediaan sumber daya ikan.
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Prosentase Pengolahan produk perikanan	16,2%	
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	1 dokumen tanda daftar	Legalitas usaha pengolahan meningkatkan kepastian dan keberlanjutan usaha.
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	30 pelaku usaha	Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan berperan sebagai penunjang peningkatan produksi perikanan karena memastikan bahwa hasil tangkapan dan budidaya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sehingga dapat diterima pasar.
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran	Jumlah Produksi Bahan	105 ton	Ketersediaan bahan baku meningkatkan daya serap industri pengolahan

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan		terhadap hasil produksi perikanan.

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Capaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan, didukung oleh capaian program kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tolak ukur kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap berupa jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 3.109 ton dengan capaian sebesar 2.571,7 ton atau 82,7% dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan adanya kemarau basah sepanjang tahun 2025, yang berdampak pada meningkatnya intensitas gelombang, curah hujan yang tidak menentu, serta berkurangnya hari operasional melaut. Kondisi tersebut secara langsung membatasi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan berimplikasi pada menurunnya volume produksi perikanan tangkap di daerah.

Program pengelolaan perikanan tangkap didukung 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini diukur melalui jumlah nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target yang ditetapkan sebanyak 30 nelayan dan berhasil tercapai

sebesar 34 nelayan (113%) yang dilaksanakan melalui *restocking* ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) pada tanggal 14 Mei 2025 di Desa Selorejo dan Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo, serta Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro, dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 70.200 ekor, terdiri atas 45.000 ekor ikan tawes dan 25.200 ekor ikan mas/tombro dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Jumlah Nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang  
Difasilitasi Pengelolaan Penangkapan Ikan

No	KUB	JUMLAH NELAYAN
1	Pokmaswas Coban Gludog	22 orang
2	KUB Satrio Brantas	12 orang
Total		34 orang

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025



Gambar 3.4 *Restocking* Ikan PUD, 2025

b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan nelayan, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan, dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh diharapkan mampu menerapkan inovasi, memperoleh pendapatan yang

layak, meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lainnya, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko usaha dan dinamika dunia usaha.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu jumlah nelayan kecil yang diberdayakan, dengan target sebanyak 70 nelayan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, kegiatan ini berhasil memberdayakan sebanyak 74 nelayan (105,7%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Rincian Jumlah Nelayan Kecil yang Diberdayakan

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Nelayan
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (pelatihan pengembangan garam)	11 nelayan
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	23 nelayan
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Fasilitasi pendaftaran asuransi ketenagakerjaan)	40 nelayan
Total		74 nelayan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan fasilitas aktifitas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap laut, dengan indikator jumlah produksi perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 2.070 ton dan terealisasi sebesar 1.225,27 ton. Hal ini disebabkan adanya kondisi anomali cuaca yang memicu

- gelombang tinggi dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi, sehingga memangkas jumlah hari melaut efektif bagi nelayan
- d. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal), dengan target 34 kapal dan terealisasi sebanyak 36 kapal (105 %) dengan rincian pada tabel di bawah:

Tabel 3.11  
Rincian Jumlah Kapal Perikanan yang Didaftar

NO	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL
1	Muh. Taufik	KUB Satri Timur
2	Imam Hanafi	Pokmaswas Jatim
3	Mahmud	-
4	Saraji	-
5	Slamet Rifai	Lestari Bengawan
6	Lumadi	-
7	Agung Budiono	-
8	Moh. Sonhadi	KM Kung Anggur
9	Murdi Handoko	-
10	Samiran	Pokmaswas
11	Samiran	Sinar Brantas
12	Guruh Diki Yulianto	-
13	Eddy Suhartono	Mutiara Brantas
14	Febrian Angga Suhendrik	KUB Brantas Jaya 01
15	Manan Muhammad	KUB Brantas Jaya 02
16	Hadi	
17	M. Khoirudin	
18	Syaiful Mustakim	TB 03
19	Abdul Roji	-
20	Atim Wahyudi	Jaya Mulya
21	Febi Nirwan Yogatama	Bengawan Makmur 06

NO	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL
22	Hariwanto	Barokah
23	Moh. Puji Haryanto	Hanuman
24	M. Syaefuloh	Pokmas 1
25	M. Syaefuloh	Bonang Tirta Lestari
26	Mambaul Ulum	Bengawan Makmur 08
27	Nur Fatoni	Ngudi Makmur
28	Rizki Kurniawansyah	Pokmas
29	Suhari	Bengawan Makmur 01
30	Sumadi	Kawan Kita
31	Suwoto	Bengawan Makmur 07
32	Suyani	Kawulo Alit
33	Ujud	Bengawan Makmur 02
34	Jari	TB 08
35	Mohamad Mujib	TB 05
36	Khusnul Khuluk	TB 07

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mencakup kegiatan perikanan budidaya yang terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta terkait penyakit dan lingkungan budidaya perikanan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi. Pada tahun 2025 produksi perikanan konsumsi ditargetkan sebesar 17.734 ton dan tercapai sebesar 17.736,42 Ton (100,01%), sedangkan produksi perikanan non konsumsi ditargetkan sebesar 205.031.900 ekor dan tercapai sebesar 205.230.494 ekor (100,09%). Capaian kinerja program pengelolaan perikanan budidaya didukung 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

### a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidayaan pembudidaya ikan kecil terdiri dari 3 sub kegiatan yang semuanya mempunyai tujuan untuk memberdayakan SDM pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar yang lebih maju melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan

fasilitasi kepada pembudidaya ikan. Pada tahun 2025 kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil diukur melalui target kinerja jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan sebanyak 120 pembudidaya dengan realisasi sebanyak 125 pembudidaya (104%). Tercapainya kinerja kegiatan ini didukung tingginya minta pembudidaya untuk mendapatkan pembinaan atau pelatihan serta dukungan dari pemerintah desa melalui kegiatan Musrenbang. Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan pada tahun 2025 dirinci melalui tabel berikut:

Tabel 3.12  
Data Jumlah Pembudidaya yang Ikan Kecil yang Diberdayakan

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH PEMBUDIDAYA
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (pelatihan budidaya ikan koi di Desa Kalipucung, budidaya maggot di Desa Pandanarum, budidaya ikan nila Kel. Sutojayan, budidaya ikan lele di Desa Tingal)	60 pembudidaya
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Pokdakan Tugu Jaya, Pokdakan Mekarsari, Pokdakan Mina Hias, Pokdakan Sarjana Lele, Pokdakan Pesona Koi)	50 pembudidaya
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Pokdakan Mina Tugu Jaya, Mekarsari, Mina Hias, Sarjane Lele, Pesona Koi)	15 pembudidaya
		125 pembudidaya

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

#### b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan diukur melalui indikator kinerja jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan (jenis), dengan

target 5 jenis dan bisa terlaksana sebanyak 5 jenis pengelolaan pembudidayaan ikan (100 %) yaitu penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan prasarana pembudidaya ikan melalui pengadaan kolam bulat untuk UPI (Unit Pembenihan Ikan), pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan melalui pengadaan pakan untuk UPI (Unit Pembenihan Ikan), serta pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat melalui pelatihan budidaya ikan sistem bioflok dan bimbingan teknis ikan hias koi.



Gambar 3.5 Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Bioflok

### 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Gambar 3.6

Capaian Produksi Perikanan Perairan Umum Darat (PUD)

Berdasarkan gambar 3.6 capaian kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diukur melalui indikator prosentase peningkatan produksi Perairan Umum Darat (PUD) dengan target sebesar 5%. Akan tetapi, pada tahun 2025 realisasi produksi ikan PUD (Perairan Umum Darat) mengalami penurunan sebesar 5,1% dari tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, yang berdampak pada menurunnya stok ikan di perairan darat. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini yaitu berupa jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dengan target 22 orang dan bisa tercapai 24 orang (109%) dengan rincian sebanyak 12 pembudidaya dan 12 orang nelayan PUD.

#### 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Indikator dari program ini yaitu prosentase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 15% dan bisa tercapai sebanyak 16,2% seperti gambar berikut:



Gambar 3.7  
Persentase Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Capaian kinerja kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan dengan target sebanyak 1 dokumen tanda daftar dan terealisasi sebanyak 1 dokumen fasilitasi perijinan SKP di Poklasar Gadung Melati.

- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Capaian kinerja kegiatan ini diukur melalui jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan dan keamanan hasil perikanan dengan target sebanyak 21 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 30 pelaku usaha.

- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota mempunyai indikator jumlah produksi bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan (ton). Target dari kegiatan ini sebanyak 100 ton dan bisa tercapai sebanyak 105 ton (105%). Kegiatan ini didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan Edukasi Gemar Makan Ikan dalam rangka mendukung

program pencegahan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 di wilayah berpotensi stunting, dengan melibatkan 30 ibu hamil dan menyusui serta 55 siswa SDN 1 Sidodadi. Kegiatan edukasi diisi dengan pelatihan pengolahan berbahan baku ikan untuk peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, bekerja sama dengan Ketua Forikan Kabupaten Blitar, PKK Desa Sidodadi, dan Bidan Desa.



Gambar 3.8 Edukasi Gemarikan tahun 2025

Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota diukur dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pendampingan pada kegiatan Workshop Penerapan Model Sustainable Blue Economy pada Masyarakat Pesisir, Pembudidaya dan Poklahsar yang diadakan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 bertempat di Aula Yayasan Al-Amin Ds. Tlogo Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar. Kegiatan ini menghadirkan 25 pelaku usaha mikro dengan memberikan wawasan mengenai konsep

Penerapan Model Sustainable Blue Economy melalui teknik pengolahan Zero Waste (tanpa limbah) dan praktik pembuatan pupuk organik berbahan baku limbah ikan oleh Tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan adalah sebesar Rp. 357.270.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 292.314.728,- Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan

Tabel 3.13  
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	-1119%	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>81.397.200,00</b>	<b>80.407.500,00</b>	<b>98,78</b>
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	19.090.000,00	18.650.000,00	97,70
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1.440.000,00	1.360.000,00	94,44
			Sub Kegiatan Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1.7650.000,00	17.290.000,00	97,96

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.517.200,00	58.047.500,00	99,20
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.467.200,00	50.077.500,00	99,23
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5.550.000,00	5.550.000,00	100
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.500.000,00	2.420.000,00	96,80
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	2.500.000,00	2.420.000,00	96,80
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	2.500.000,00	2.420.000,00	96,80
			Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Satu)	1.290.000,00	1.290.000,00	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1.290.000, 00	1.290.000,00	100
			<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>251.412.20 0,00</b>	<b>187.995.728, 00</b>	<b>74,78</b>
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	172.314.75 0,00	118.122.228, 00	68,55
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	162.314.75 0,00	108.342.228, 00	66,75
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	7.500.000, 00	7.280.000,00	97,07
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.500.000, 00	2.500.000,00	100
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	79.097.450 ,00	69.873.500,0 0	88,34
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.580.000, 00	2.560.000,00	99,22

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000,00	3.149.070,00	78,73
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.120.000,00	17.156.330,00	77,56
			Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	37.000.000,00	34.070.000,00	92,08
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.397.450,00	12.938.100,00	96,57
			<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>3.729.900,00</b>	<b>3.687.500,00</b>	<b>98,86</b>
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.729.900,00	3.687.500,00	98,86
			Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota	2.439.900,00	2.400.000,00	98,36

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1.290.000,00	1.287.500,00	99,81
			<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>20.731.150,00</b>	<b>2.0224.000,00</b>	<b>97,55</b>
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	2.500.000,00	2.500.000,00	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	2.500.000,00	2.500.000,00	100
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1.470.000,00	1.470.000,00	100
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada	1.470.000,00	1.470.000,00	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko			
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	16.761.150,00	16.254.000,00	96,97
			Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.841.150,00	15.334.000,00	96,79
			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	920.000,00	920.000,00	100
			<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp. 357.270.450,00</b>	<b>Rp. 292.314.728,00</b>	<b>81%</b>
			Tingkat efisiensi			-13%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar -1119% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 81%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan dengan nilai efisiensi

sebesar -13%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran sebesar 81% menunjukkan bahwa secara administratif dan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan relatif baik. Namun demikian, serapan anggaran tersebut belum diikuti oleh pencapaian kinerja yang optimal, khususnya pada indikator produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efektif dalam mengungkit kinerja produksi, terutama karena adanya faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, kemarau basah yang tidak dapat dikendalikan melalui intervensi anggaran semata.

#### 2. Efisiensi SDM

Dari sisi SDM, pendampingan teknis, pembinaan nelayan dan pembudidaya, serta kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian, keterbatasan anggaran serta luasnya wilayah kerja menyebabkan intensitas pendampingan belum merata dan optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pelaku usaha perikanan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan dan pasar, sehingga peningkatan produksi belum dapat tercapai secara maksimal.

#### 3. Efisiensi Waktu

Pelaksanaan sebagian kegiatan mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca dan keterbatasan aktivitas di lapangan, khususnya pada kegiatan perikanan tangkap dan perairan umum daratan. Keterlambatan atau terbatasnya waktu pelaksanaan tersebut menyebabkan sebagian potensi produksi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam tahun berjalan. Akibatnya, meskipun kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran

telah diserap, dampaknya terhadap peningkatan produksi belum dapat dirasakan secara penuh.

## 2. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu persentase peningkatan produktifitas ternak, persentase produk peternakan yang layak edar dan prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Sasaran ini merupakan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja 2025 yang ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ada di Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021-2026.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan adalah sebesar 114% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.14  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produktifitas ternak (%)	0,5	0,7	140%
		Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,2	98,1	99%
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	92	95,9	104%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					114%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, indikator pertama persentase peningkatan produktifitas ternak terealisasi dengan capaian 140% dengan target peningkatan sebesar 0,5% dengan realisasi sebesar 0,7%. Capaian kinerja indikator tersebut dapat direalisasi karena

adanya peningkatan parameter produktifitas susu di tahun 2025. Dikarenakan persentase produk peternakan yang layak edar dan dan prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis merupakan indikator yang ada di Renstra 2025-2029, indikator tersebut akan dianalisa di sasaran selanjutnya pada laporan ini.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dan 2023.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 :

Tabel 3.15  
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Dan Kualitas Produk Peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produktifitas ternak (%)	0,5	0,7	0,3	0,2
		Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,2	98,1	97,9	97
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	92	95,9	92,3	91

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Selain itu, capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya produktifitas dan kualitas tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra:

Tabel 3.16

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan terhadap target akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produktifitas ternak (%)	0,5	0,7	140%
		Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,2	98,1	99%
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	95,9	119%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

### 3. Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu persentase peningkatan produksi komoditas peternakan, persentase produk peternakan yang layak edar dan persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan definisi sebagai berikut:

- a) Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan  
Indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut;
  - 1) Daging  
Yaitu peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh.
  - 2) Telur  
Yaitu peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh.
  - 3) Susu  
Yaitu peningkatan total produksi susu sapi dan kambing

- b) Persentase produk peternakan yang layak edar  
Merupakan perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi
- c) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis  
Merupakan perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan adalah sebesar 137% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.17  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Kualitas Produk Peternakan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	1. Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)			
		- Daging	3,95	5,83	147%
		- Telur	3,4	5,78	170%
		- Susu	1,4	4,34	310%
		2. Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98	98,1	100,1
		3. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	93	95,9	103,1
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					137%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel 3.17 diatas, dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Indikator persentase peningkatan produksi komoditas terealisasi dengan rata-rata capaian seluruh komoditas sebesar 5,3% atau sebesar 209%. Terlaupauinya capaian kinerja ini didukung adanya hal ini didukung adanya program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mendorong peningkatan permintaan produk

peternakan, khususnya daging, telur, dan susu. Berikut tabel produksi komoditas peternakan tahun 2023-2025 :

Tabel 3.18  
Capaian produksi daging tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas <i>Products and Kinds of Livestock/Poultry</i>	2023	2024	2025
<b>Daging (Ton)</b>			
- Sapi/ Cow	1.295,070	1.619,866	1.415,829
- Sapi Perah	2,800	-	-
- Kerbau/ Buffalo	-	-	-
- Kuda/ Horse	-	-	-
- Babi/ Pigs	-	-	-
- Kambing/ Goat	822,800	620,997	550,512
- Domba/ Sheep	268,110	259,916	272,538
- Ayam Buras/ Domestic Hen	1.386,080	1.042,788	709,850
- Ayam Petelur/ Layer Hen	2.096,350	2.146,108	2.252,297
- Itik/ Duck	486,490	493,808	501,228
- Ayam Pedaging/ Broiler	5.261,740	5.906,737	7.097,495
- Entok/ Goose	21,610	22,321	23,040
- Kelinci/ Rabbit	1,100	0,853	0,192
- Puyuh/ Quail	59,700	58,104	58,235
- Merpati/ Dove	2,040	1,614	1,188
<b>Total</b>	<b>11.703,890</b>	<b>12.173,112</b>	<b>12.882,404</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 3.19  
Capaian produksi telur tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas <i>Products and Kinds of Livestock/Poultry</i>	2023	2024	2025
<b>Telur/ Eggs (Kg)</b>			
- Ayam Buras/ Domestic Hen	1.324.863	994.774	678.499
- Ayam Ras/ Pedigree Hen	141.027.401	144.276.407	151.518.128
- Itik/ Duck	9.637.046	9.828.675	9.990.502
- Entok/ Manila Duck	82.520	84.960	87.924
- Puyuh	995.170	3.015.034	5.063.891
<b>Total</b>	<b>153.067.000</b>	<b>158.199.850</b>	<b>167.338.944</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 3.20  
Capaian produksi susu tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas <i>Products and Kinds of Livestock/Poultry</i>	2023	2024	2025
<b>Susu/ Milk (Ton)</b>			
- Sapi/ <i>Dairy Cow</i>	48.178,300	40.529,822	42.289,061
- Kambing Perah/ <i>Dairy Goats</i>	21,000	65,509	66,884
<b>Total</b>	<b>48.199,300</b>	<b>40.595,331</b>	<b>42.355,945</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

- 2) Indikator persentase produk peternakan yang layak edar dapat terealisasi sebesar 98,1% dari target sebesar 98%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah produk yang diawasi pada tahun 2025, yang terdiri dari pengawasan produk pangan asal hewan maupun pemotongan hewan kurban dan pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH). Indikator persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis
- 3) Indikator persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, sehingga dapat menjaga kesehatan hewan, mencegah terjadinya wabah, serta menjamin keberlanjutan usaha peternakan di daerah. Tahun 2025 target kinerja indikator ini sebesar 93%, dan terealisasi sebesar 95,9%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM yang mumpuni dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kabupaten Blitar. Dari total 248 desa dan kelurahan, sebanyak 238 wilayah bebas kasus atau terkendali dengan kematian nihil, meskipun masih

terdapat 10 wilayah terdampak dengan kasus kematian maupun potong paksa dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21  
Wilayah tidak terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis tahun 2025

No	Desa/Kelurahan	Kasus Kematian/Potong Paksa
1	Ds. Mojorejo Kec. Wates	2 Kasus
2	Ds. Semen Kec. Gandusari	1 Kasus
3	Ds. Krisik Kec. Gandusari	1 Kasus
4	Ds. Tulungrejo Kec. Gandusari	1 Kasus
5	Ds. Bence Kec. Garum	1 Kasus
6	Ds. Panggung Asri Kec. Panggungrejo	1 Kasus
7	Ds. Sumber Kec. Sanankulon	1 Kasus
8	Ds. Temenggungan Kec. Udanawu	1 Kasus
9	Ds. Penataran Kec. Nglegok	1 Kasus
10	Ds. Sambigede Kec. Binangun	1 Kasus

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar akan ketersediaan daging, telur dan susu untuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sehingga produksi komoditas peternakan mengalami kenaikan atau peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2024 dan 2023. Selain itu peningkatan juga terjadi untuk indikator persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis (PHMS), hal ini didukung oleh semakin intensifnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan melalui penguatan surveilans, pelaksanaan vaksinasi, serta respon cepat terhadap kasus penyakit hewan di lapangan. Upaya tersebut mampu menekan risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis, sehingga mendukung terjaganya produktivitas dan kualitas hasil peternakan di Kabupaten Blitar.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 :

Tabel 3.22

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	1. Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)				
		- Daging	3,95	5,83	3,92	-49
		- Telur	3,4	5,78	3,35	-3
		- Susu	1,4	4,34	1,39	4,1
		2. Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98	98,1	97,9	97
		3. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	93	95,9	92,3	91

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai dengan rata-rata 163,2% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2030. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra:

Tabel 3.23

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan terhadap target akhir Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	1. Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)			
		- Daging	4,00	5,83	145%

		- Telur	3,50	5,78	165%
		- Susu	1,40	4,34	310%
		2. Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,5	98,1	99%
		3. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	98	95,9	97%
Rata-Rata					163,2%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka rata-rata capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga.

Tabel 3.24

Perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	1. Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)		
		- Daging	5,83	5,77 (Kota Blitar)
		- Telur	5,78	5,09 (Kota Blitar)
		- Susu	4,34	0,59 (Kota Blitar)
		2. Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,1	Na
		3. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	95,9	Menunggu rilis angka dari Jawa Timur/Nasional

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

### **1) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**

#### **a) Optimalisasi penyediaan sarana peternakan**

Melalui fasilitasi penyediaan bibit ternak melalui pelayanan inseminasi buatan (IB), pengawasan peredaran pakan, serta pengawasan peredaran obat hewan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, menjamin ketersediaan pakan yang memenuhi standar, serta memastikan penggunaan obat hewan yang aman dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak.

#### **b) Peningkatan penyuluhan/pendampingan peternak**

Melalui pembinaan teknis serta penguatan kelembagaan peternak. Pendampingan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam penerapan budidaya ternak yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha peternakan.

### **2) Indikator Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar**

#### **1) Optimalisasi Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan, mutu, dan keutuhan produk asal hewan, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Kegiatan pengawasan Kesmavet bertujuan untuk menjamin bahwa produk peternakan yang

beredar di masyarakat memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

## 2) Optimalisasi Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan Terpadu secara lebih efektif. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana tersebut mendukung tertibnya proses pemotongan dan perdagangan ternak, meningkatkan aspek higienitas dan keamanan produk, serta memperlancar distribusi produk peternakan yang memenuhi standar kelayakan edar.

## 3) Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

### 1) Optimalisasi Pengendalian Kesehatan Hewan

Pengendalian PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, yang meliputi pelaksanaan vaksinasi, surveilans, serta respon cepat terhadap kejadian penyakit. Upaya ini bertujuan untuk menekan risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis, menjaga kesehatan ternak,

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan adalah sebagai berikut:

### 1) Indikator Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

- a) Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang berpotensi

menyebarkan secara cepat antar ternak, menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan dan produktivitas ternak, meningkatkan risiko kematian ternak, serta berdampak pada menurunnya pendapatan peternak dan stabilitas produksi komoditas peternakan di daerah.

- b) Masih adanya usaha peternakan yang menimbulkan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah ternak yang belum optimal, pencemaran air dan udara di sekitar lokasi usaha.

## **2) Indikator Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar**

- a) Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang belum sepenuhnya menerapkan standar kelayakan dan keamanan pangan, termasuk dalam hal pengelolaan sanitasi, higienitas, dan pengendalian limbah.

## **3) Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis**

- a) Masih adanya potensi penyebaran penyakit hewan menular strategis yang dipengaruhi oleh tingginya mobilitas ternak antar wilayah, lemahnya penerapan biosekuriti pada sebagian peternakan rakyat, serta keterbatasan kesadaran peternak dalam melakukan pelaporan dini terhadap gejala penyakit. Kondisi ini menyebabkan upaya pengendalian dan pemutusan rantai penularan penyakit belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.25

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Peternakan

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan Pencapaian
Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	-41,72	
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2 jenis fasilitas	Pemanfaatan SDG membantu menjaga keanekaragaman genetik ternak, mendukung peningkatan kualitas dan ketahanan ternak terhadap penyakit
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/pakan ternak yang diawasi	1.459 sampel	Pengawasan peredaran pakan ternak mendukung produktivitas ternak
		Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang diawasi	2 unit usaha	Pengawasan peredaran obat hewan menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif, mencegah kerugian produksi akibat kesalahan penggunaan obat
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Unit Usaha	11 unit usaha	Pengawasan pakan ternak memastikan kualitas pakan dan

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan Pencapaian
		Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pakan Ternak mandiri yang diawasi	pakan ternak	ketersediaan hijauan, mendukung pertumbuhan ternak optimal dan kualitas produk yang lebih baik.
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	84,2%	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun / dipelihara	6 unit	Pemeliharaan prasarana mendukung kelancaran kegiatan produksi, dan pemasaran ternak, sehingga menunjang produktivitas dan kualitas produk.
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	95,5%	
			Jumlah unit usaha peternakan yang	35 unit usaha	

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan Pencapaian
			tersertifikasi		
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	97%	Menjamin kesehatan ternak sehingga produktivitas terjaga
		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang diterbitkan	885 dokumen	Mencegah masuknya penyakit hewan, dan menjaga kualitas produk ternak.
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	699 pelayanan	Mengendalikan penyakit hewan sehingga tidak mempengaruhi produktivitas ternak.
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	71 unit usaha	Pengawasan kesmavet memastikan produk ternak aman dan layak edar, sehingga meningkatkan kualitas produk peternakan.

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan Pencapaian
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	3.264 Lokasi	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100%	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	1 Bencana	Penanganan bencana peternakan memastikan produksi ternak tidak terganggu, sehingga produktivitas dan kualitas produk tetap terjaga.
	Program Perizinan Usaha Pertanian		Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	25%	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi	Izin Usaha Produksi	0	

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan Pencapaian
		Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan		
	Program Penyuluhan Pertanian		Prosentase peningkatan peternak terampil	13,5%	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternak an yang dilaksanakan	310 orang	Pendampingan langsung membantu peternak menerapkan manajemen ternak yang baik, mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan.

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Capaian sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan, didukung oleh capaian program kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ditetapkan dengan indikator kinerja berupa prosentase peningkatan penyediaan bibit ternak dengan target 0,3%. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 41,72% yang diperoleh total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini sebanyak 24.004 ekor dibandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2024 sebanyak 41.187 ekor seperti yang terlihat di gambar berikut:



Gambar 3.9 Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

Adanya penurunan ini, disebabkan adanya dampak jangka panjang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dimana pada tahun 2025 masih terdapat 200 kasus yang mengakibatkan terganggunya siklus reproduksi ternak, antara lain berupa perpanjangan siklus birahi serta meningkatnya kejadian kawin berulang, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan proses perkawinan dan kelahiran ternak

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian kegiatan ini diukur melalui target kinerja berupa jumlah fasilitasi pengelolaan SDG sebanyak 2 fasilitasi, dan terealisasi 2 fasilitasi (100%) yaitu sub kegiatan peningkatan kualitas SDH Hewan berupa sosialisasi kepada 3 (tiga) kelompok tani dan sub kegiatan pemanfaatan SDG hewan berupa pelaksanaan *Euforia Vetservice* dan *Outing Class* Edukasi Peternakan.



Gambar 3.10 *Outing Class* Edukasi Peternakan

- b. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memastikan pakan ternak berkualitas melalui uji laboratorium pakan ternak yang sesuai dengan standar mutu. Tujuan utamanya adalah mendukung pengembangan sektor peternakan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ternak, dan menjaga kesehatan hewan ternak. Capaian kinerja kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan uji sampel yang ada di laboratorium pakan ternak.

Indikator capaian kegiatan ini adalah jumlah bibit/pakan ternak yang diawasi dengan target sebanyak 1.000 sampel

dan terealisasi sebanyak 1.459 sampel dengan rincian pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.11  
Capaian Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar

c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap unit usaha yang melakukan peredaran obat hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 4 unit usaha dan terealisasi sejumlah 2 unit usaha (50%). Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini dikarenakan Kurangnya kesadaran pelaku usaha obat hewan untuk mengurus perizinan obat hewan ataupun kurangnya sosialisasi terkait adanya perizinan obat hewan.

d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap unit usaha pakan ternak guna memastikan bahwa pakan yang digunakan oleh peternak memiliki mutu yang terjamin serta memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pakan dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah unit usaha pakan ternak yang diawasi, dengan target sebanyak 10 unit

usaha. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi capaian mencapai 11 unit usaha (100%). Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjaga kualitas pakan ternak sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Blitar.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ditetapkan dengan indikator kinerja berupa prosentase prasarana peternakan layak fungsi dengan target 80% dan terealisasi sebesar 84,2%. Meningkatnya persentase prasarana peternakan yang layak fungsi didukung adanya RPU yang siap beroperasi pada tahun 2026. Namun demikian, masih terdapat beberapa prasarana peternakan yang belum layak fungsi sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, serta optimalisasi pemanfaatan prasarana yang ada agar seluruh fasilitas peternakan dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan.



Gambar 3.12 Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi

Capaian kinerja program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

### 1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah jumlah prasana peternakan yang dibangun/dipelihara dengan target 6 unit dan bisa tercapai 6 unit (100%). 6 unit tersebut diakomodir melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu pembangunan,

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya berupa pengadaan genteng untuk perawatan PHT Srengat; Pengurusan PBG SLF untuk Gedung IB Dinas Peternakan dan Perikanan dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH).

### **3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, peningkatan kesejahteraan hewan, serta pengawasan produk asal hewan agar aman dikonsumsi. Tolak ukur capaian program ini adalah jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Unit usaha peternakan yang tersertifikasi pada tahun 2025 tercapai 35 unit usaha dari target 35 unit usaha (100%)

Indikator prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai sebesar 95,5% dari target sebesar 94%. Sesuai waktu tanggap yang dimaksud adalah penanganan penyakit hewan menular dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar waktu respon yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut didapatkan dengan perhitungan jumlah penanganan penyakit hewan menular yang tertangani pada tahun 2025 sebanyak 204 kasus dengan rincian sesuai waktu tanggap 195 kasus (95,09%) dan yang tidak sesuai dengan waktu tanggap sebanyak 9 kasus (4,41%) karena adanya keterbatasan petugas dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada awal tahun 2025. Capaian ini menjadi wujud nyata komitmen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya cepat

tanggap, koordinasi yang solid, serta dedikasi petugas lapangan dalam melaksanakan penyidikan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Blitar.

Program ini didukung 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah prosentase kesehatan hewan yang dijamin. Prosentase kesehatan dijamin menggambarkan seberapa besar cakupan penjaminan kesehatan hewan yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terhadap populasi hewan. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% dengan target kinerja 97,4%. Keberhasilan capaian kegiatan ini dipengaruhi adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kementerian Pertanian dalam penyediaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Keberhasilan capaian kegiatan ini dipengaruhi adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kementerian Pertanian dalam penyediaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sehingga pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu menekan penyebaran kasus di wilayah Kabupaten Blitar.

- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang diterbitkan. Pada tahun 2025 tercapai 855 dokumen dari 700 dokumen yang ditargetkan. Terlampauinya target kinerja kegiatan ini didukung oleh semakin optimalnya pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen pemasukan dan pengawasan ternak

yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan ini merupakan jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola. Tahun 2025 tercapai 699 pelayanan dari 555 pelayanan yang ditargetkan. Total capaian tersebut didapatkan dari 129 pelayanan laboratorium dan 570 pelayanan medik veteriner. Capaian jasa laboratorium digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.13 Capaian Jasa pelayanan Laboratorium

d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tolak ukur kinerja kegiatan ini berdasarkan jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi, dimana pada tahun 2025 ini terealisasi sejumlah 71 unit usaha dari 40 unit usaha yang ditargetkan.

Capaian kegiatan ini diperoleh dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan berupa pengendalian dan pemantauan terhadap distribusi, penjualan, dan peredaran hewan serta produk hasil hewan.dengan pengambilan sampel produk asal hewan di

Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, bakso) untuk diperiksa secara organoleptis pada Laboratorium Kesmavet dan sub kegiatan pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan berupa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada unit usaha yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk hewan.

e. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang diawasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Kegiatan ini direalisasikan melalui jumlah titik lokasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada tahun 2025. Tahun 2025 sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 3.264 lokasi dari 3.360 lokasi yang ditargetkan.

#### **4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Tolak ukur kinerja program ini adalah prosentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Tahun 2025 realisasi kinerja program ini tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Realisasi capaian dihitung dengan perhitungan total prosentase penyelesaian dari semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan dari yang ditargetkan sebesar 100%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Melalui program pengendalian bencana peternakan, indikator kinerja berupa jumlah bencana yang ditangani dan dikendalikan telah berhasil melampaui target yang

ditetapkan. Dari target 1 bencana, pada tahun ini terealisasi penanganan sebanyak 1 (satu) yaitu kegiatan investigasi kasus gigitan kucing yang terjadi di Desa Ponggok.

## **5. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Tolak ukur kinerja program ini berupa peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2025 tercapai 25% dari target yang ditetapkan yaitu 5% yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2024 (34 rekomendasi) dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2025 (40 rekomendasi). Terlampauinya target kinerja pada program ini didukung beberapa hal :

- a. Masa waktu bertepatan dengan habisnya masa ijin praktek sebelumnya sehingga banyak petugas Paramedik inseminator dan dokter hewan yang melakukan perpanjangan izin SIPP dan SIP.
- b. Adanya peraturan Permentan No. 12 Tahun 2025 yang mengatur lebih spesifik tentang Pelayanan Perkawinan Ternak, termasuk pengawasan terhadap pelaksana (petugas IB) melalui laporan dan inspeksi lapangan, serta mencakup layanan IB, transfer embrio, dan pemeriksaan kebuntingan.

Pelaksanaan program ini tercapai melalui kegiatan:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Indikator kegiatan ini adalah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2024 tercapai 0 dari yang ditargetkan sejumlah 2, hal ini karena kewenangan penerbitan izin usaha ada pada OPD lainnya.

## **6. Program Penyuluhan Pertanian**

Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2025 tercapai 13,5% dari 10% yang ditargetkan dan didapatkan dari perbandingan total peternak terampil pada tahun 2025 (310 peternak) terdiri dari pelatihan budidaya ternak 160 orang, pembinaan koperasi 60 orang dan sosialisasi perizinan dasar bagi pelaku usaha 90 orang dibandingkan peternak terampil di tahun 2024 (273 peternak). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kompetensi peternak, sehingga mampu mendorong produktivitas dan kualitas usaha peternakan di daerah. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah berupa jumlah peternak yang memperoleh fasilitas penyuluhan peternakan yang dilaksanakan dengan target 145 orang dan terealisasi sebanyak 310 orang. Capaian kinerja yang melampaui target tersebut didukung oleh tingginya antusiasme peternak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, serta optimalnya pelaksanaan fasilitasi pertemuan kelompok ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Tabel 3.26  
Rincian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di  
Desa/Kecamatan

NO	KEGIATAN	UNIT/K ELOMP OK	PESERTA	KETERANGAN
1	Pelatihan budidaya ternak ruminansia (kambing domba) 8-9 Juli	1	100 orang	Ds. Pohgajih Kec. Selorejo
2	Pelatihan budidaya ternak ruminansia (kambing domba) 10 Juli	1	30 orang	Ds. Sumberjo Kec. Kademangan
3	Pelatihan budidaya maggot 23 Oktober	1	30 orang	Ds. Maron Kec. Kademangan
4	Pembinaan Koperasi Bidang Peternakan 19 November	1	60 orang	

5	Sosialisasi Perizinan Dasar Bagi Pelaku Usaha Sub Sektor Peternakan 27 November	1	90 orang	
6	Fasilitasi Pengusulan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) 3 Sep-29 Sep	11	-	

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas peternakan diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan adalah sebesar Rp. 1.250.457.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.132.718.530 (90,58) Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan

Tabel 3.27  
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	137%	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>456.460.975,00</b>	<b>394.412.367,00</b>	<b>86,41</b>
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	61.899.000,00	47.986.100,00	77,52
			Sub Kegiatan Peningkatan	51.899.000,00	39.470.000,00	76,05

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
			Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10.000.000,00	8.516.100,00	85,16
			Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.732.600,00	99.465.804,00	86,69
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	114.732.600,00	99.465.804,00	86,69
			Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	295.450,00	290.000,00	98,16
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	295.450,00	290.000,00	98,16
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	279.533.925,00	246.670.463,00	88,24
			Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit	279.533.925,00	246.670.463,00	88,24

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			
			<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>263.758.050,00</b>	<b>234.309.032,00</b>	<b>88,83</b>
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	263.758.050,00	234.309.032,00	88,83
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	44.394.300,00	39.869.880,00	89,81
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	219.363.750,00	194.439.152,00	88,64
			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>351.755.925,00</b>	<b>339.025.031,00</b>	<b>96,38</b>
			Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	7.169.400,00	7.148.900,00	99,71
			Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3.789.400,00	3.789.400,00	100,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan	940.000,00	920.000,00	97,87

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2.440.000,00	2.439.500,00	99,98
			Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00
			Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.494.550,00	302.530.131,00	96,20
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	31.540.000,00	27.597.256,00	87,50
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	282.954.550,00	274.932.875,00	97,17
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	3.409.750,00	2.974.000,00	87,22

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Masyarakat Veteriner			
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1.879.750,00	1.444.000,00	76,82
			Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	22.842.225,00	22.532.000,00	98,64
			Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	22.842.225,00	22.532.000,00	98,64
			<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
			Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
			<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>2.999.900,00</b>	<b>2.999.400,00</b>	<b>99,98</b>
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit	2.999.900,00	2.999.400,00	99,98

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			
			Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	2.999.900,00	2.999.400,00	99,98
			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>173.682.200,00</b>	<b>160.172.700,00</b>	<b>92,22</b>
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	173.682.200,00	160.172.700,00	92,22
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	173.682.200,00	160.172.700,00	92,22
			<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp. 1.250.457.050,00</b>	<b>Rp. 1.132.718.530,00</b>	<b>90,58 %</b>
			Tingkat efisiensi			1,5%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 137% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar

90,58%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan dengan nilai efisiensi sebesar 1,5%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2) Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran sebesar 90,58% menunjukkan penggunaan dana telah berjalan efektif, dimana sebagian besar anggaran dapat terserap dengan baik sesuai kebutuhan program dan kegiatan. Anggaran yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana peternakan, pemberdayaan peternak, serta pengendalian penyakit hewan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas produk peternakan, sehingga nilai kinerja melebihi target (137%).

3) Efisiensi SDM

SDM yang terlibat, baik tenaga teknis, medik dan paramedik telah dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. baik, sehingga mendorong produktivitas dan kualitas produk. Efisiensi SDM tercapai karena tenaga yang terbatas mampu memberikan dampak nyata pada capaian kinerja.

4) Efisiensi Waktu

Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai prioritas, sehingga seluruh proses kegiatan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Efisiensi waktu ini berperan penting dalam memastikan manfaat dari setiap kegiatan dapat dirasakan secara tepat waktu oleh peternak dan pelaku usaha, sehingga mendukung pencapaian kinerja melebihi target.

#### **4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai dengan yang terlampir

di perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 diukur melalui indikator nilai SAKIP perangkat daerah. Definisi operasional dari indikator nilai SAKIP adalah tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebesar 107% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.28  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	75/BB	79,4/BB	105%
Capaian Kinerja					105%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 3.29  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,6	79,4	107%
Capaian Kinerja					107%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel 3.25 diatas, indikator nilai sakip perangkat daerah dapat direalisasi sebesar 79,4 (107%). Tercapaiannya sasaran ini, ini didukung oleh semakin meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta konsistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja yang selaras antara sasaran, indikator, dan program kegiatan. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2024. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai SAKIP mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penyesuaian standar penilaian oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 :

Tabel 3.30  
Perkembangan kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	75/BB	79,4/BB	73,4/BB	81,47/A

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Tabel 3.31  
Perkembangan kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,6	79,4	73,4	81,47

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Selain itu, capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029 dan menjadi capaian akhir periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 99,25% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026 dan tercapai 105% dari target tahun terakhir Renstra 2025-2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.32  
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80/A	79,4/BB	99,25%

Tabel 3.33  
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	75	79,4	105%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kota Blitar maka capaian ini lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja dengan Kota Blitar:

Tabel 3.34  
Perbandingan Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kota Tetangga
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	79,4	85,23 (DKPP Kota Blitar)

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan

beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan kesekretariatan untuk mendukung Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Keterbatasan Sistem Pengumpulan Data  
Sistem informasi pengumpulan data kinerja dan belum mendukung pemantauan real-time. Hal ini menyulitkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data secara cepat dan akurat. Upaya peningkatan kapasitas sistem informasi serta pelatihan SDM dilakukan untuk memastikan data kinerja dapat tersaji tepat waktu dan mendukung pengambilan keputusan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.35  
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan	100%	

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
			pemerintah daerah		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	Tersusunnya seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	Terlaksananya seluruh proses penatausahaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu, tertib, dan akuntabel.
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi	95%	Layanan administrasi umum telah dilaksanakan secara akuntabel

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
			umum yang dilaksanakan secara akuntabel		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95%	Proses pengadaan yang telah mengacu pada perencanaan kebutuhan dan ketentuan pengadaan barang/jasa.
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90%	Layanan penunjang dapat disediakan tepat waktu sehingga dapat mendukung kegiatan di Dinas Peternakan dan Perikanan
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	90%	Barang Milik Daerah dalam kondisi layak pakai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
			ahan Daerah dalam kondisi baik		

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh capaian program kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Indikator program ini adalah rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata capaian kinerja kegiatan.

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah ditetapkan melalui kinerja Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat

waktu dan akuntabel dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pengadaan alat tulis kantor), sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (pengadaan karcis) dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya (pengadaan laptop, personal komputer dan AC).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu penyediaan

jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini ditetapkan melalui indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 96% dan dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan, dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 10.829.015.343,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.084.785.695,00 (93,13) Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.36  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	107%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.829.015.343,00</b>	<b>10.084.785.695,00</b>	<b>93,13</b>
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	2.516.550,00	2.454.800,00	97,55

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.364.550,00	1.328.300,00	97,34
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.152.000,00	1.126.500,00	97,79
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.305.137.200,00	8.673.590.553,00	93,21
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.282.797.800,00	8.651.255.743,00	93,20
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.340.000,00	20.340.000,00	100
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	799.800,00	798.300,00	99,81
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.199.600,00	1.196.510,00	99,74
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.728.003,00	131.950.709,00	95,11
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.011.350,00	31.899.756,00	86,19

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.667.250 ,00	19.910.000,0 0	96,34
			Sub Kegiatan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.049.403 ,00	80.140.953,0 0	98,88
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.614.100 ,00	74.681.101,0 0	91,51
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.614.100 ,00	74.681.101,0 0	91,51
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.467. 490,00	941.576.397, 00	90,50
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.309.250, 00	2.222.000,00	96,22
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.904.04 0,00	143.730.730, 00	81,70
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	862.254.20 0,00	795.623.667, 00	92,27
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.552.00 0,00	260.532.135, 00	99,99
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	233.922.00 0,00	233.902.135, 00	99,99

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	26.630.000 ,00	26.630.000,0 0	100
			<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp. 10.829.015 .343,00</b>	<b>Rp. 10.084.785.6 95,00</b>	<b>93,13 %</b>
			Tingkat efisiensi			1,1%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 105% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,13%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah dengan nilai efisiensi sebesar 1,1%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran sebesar 93,13% menunjukkan bahwa alokasi dana digunakan secara efektif dan hampir seluruh anggaran terserap sesuai kebutuhan program dan kegiatan. Dana yang digunakan untuk mendukung administrasi, sistem pelaporan, koordinasi antar-unit, dan peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah di atas target.

#### 2) Efisiensi SDM

Tenaga teknis maupun administrasi yang terlibat telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung seluruh kegiatan. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan menjadikan proses penyusunan laporan kinerja, pemantauan indikator SAKIP, dan koordinasi antar bidang lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini berkontribusi pada pencapaian kinerja yang melebihi target.

### 3) Efisiensi Waktu

Pelaksanaan kegiatan program dan administrasi berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Efisiensi waktu ini tercermin dari terselesaikannya seluruh proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan kinerja tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dalam meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

## C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.37  
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81.397.200,00	80.407.500,00	98,78
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	251.412.200,00	187.995.728,00	74,78
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.729.900,00	3.687.500,00	98,86
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150,00	2.0224.000,00	97,55
2		Program Penyediaan Dan	456.460.975,00	394.412.367,00	86,41

	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Pengembangan Sarana Pertanian			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	263.758.050,00	234.309.032,00	88,83
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	351.755.925,00	339.025.031,00	96,38
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.800.000,00	1.800.000,00	100
		Program Perizinan Usaha Pertanian	2.999.900,00	2.999.400,00	99,98
		Program Penyuluhan Pertanian	173.682.200,00	160.172.700,00	92,22
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.829.015.343,00	10.084.785.695,00	93,13

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan data realisasi keuangan pada tabel di atas, secara umum tingkat penyerapan anggaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan sebagian besar program mencapai realisasi di atas 85%. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang realisasinya belum optimal, khususnya pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang hanya mencapai 74,78% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Rendahnya serapan anggaran pada program tersebut terutama disebabkan adanya sisa kontrak yang tidak dapat digunakan.

Untuk mengatasi kendala dalam realisasi keuangan pada tahun 2025, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain dengan memperkuat koordinasi antara bidang teknis dan pengelola keuangan, melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian perencanaan kegiatan

agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebijakan anggaran, sehingga alokasi dana dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor peternakan dan perikanan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)		-1119%	Sangat Rendah
		Perikanan Tangkap	-3360%		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
		Perikanan Budidaya (konsumsi)	100%		
		Perikanan Budidaya (non konsumsi)	100%		
2.	Meningkatnya produksi dan kualitas produk dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)		137%	Sangat Tinggi
		Daging	147%		
		Telur	170%		
		Susu	310%		
		Persentase produk peternakan yang layak edar (%)	100,1%		
		Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	103,1		
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Angka)	107%	107%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD			-2,9	Sangat Rendah

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berada pada kategori Sangat Rendah (-2,9%), yang terutama disebabkan oleh tidak tercapainya kinerja perikanan tangkap dengan capaian -3.360%. Sementara itu, kinerja sektor peternakan dan

akuntabilitas perangkat daerah justru menunjukkan hasil sangat tinggi, masing-masing sebesar 137% dan 107%.

Dengan demikian, rendahnya capaian rata-rata kinerja perangkat daerah lebih dipengaruhi oleh satu indikator yang sangat rendah, bukan karena kegagalan menyeluruh. Meskipun produksi perikanan tangkap menurun, sektor ini tetap memberikan kontribusi ekonomi yang penting terhadap PDRB, karena nilai produksi tetap tinggi seiring pergeseran jenis tangkapan ke komoditas bernilai jual tinggi.

## B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan ditemukan bahwa kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap belum tercapai sesuai target, sehingga untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3  
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	
		- Perikanan tangkap	Meningkatkan sarana atau peralatan penangkapan untuk ikan-ikan tangkapan yang banyak ditangkap oleh nelayan seperti ikan layur.
		- Perikanan budidaya (konsumsi)	Mendorong pembudidaya untuk mengembangkan pakan alami, maupun pakan mandiri.
		- Perikanan budidaya (non konsumsi/hias)	Mendorong pembudidaya untuk mengembangkan pemasaran ikan secara digital
2.	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan komoditas peternakan	Meningkatkan produktivitas peternakan secara berkelanjutan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan	Penanganan yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor peternakan, dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan dini, surveilans kesehatan hewan, percepatan penanganan kasus penyakit, pemberian vaksinasi, serta sosialisasi kepada peternak terkait biosekuriti, sehingga dapat menekan risiko penyebaran penyakit dan menjaga stabilitas produktivitas ternak.
		Persentase produk peternakan yang layak edar	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha produk peternakan guna menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan edar produk yang beredar di masyarakat
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Melakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator program kegiatan agar lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja.

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja**
- B. Indikator Kinerja Utama**
- C. Perjanjian Kinerja**
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah**



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

**Meningkatnya produksi  
perikanan tangkap**

Jumlah produksi  
perikanan tangkap

**Meningkatnya produksi  
perikanan budidaya**

Jumlah produksi  
perikanan konsumsi  
Jumlah produksi  
perikanan non konsumsi

**Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha kelautan  
dan perikanan**

Persentase kepatuhan  
pelaku usaha kelautan dan  
perikanan

**Meningkatnya  
pengolahan hasil produk  
perikanan**

Persentase pengolahan  
produk perikanan

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan  
(daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan  
menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
ketersediaan sarana  
peternakan**

Persentase Peningkatan  
Penyediaan Bibit Ternak

**Meningkatnya  
pemanfaatan prasarana  
peternakan yang ada**

Persentase Prasarana  
Peternakan Layak Fungsi

**Meningkatnya status  
kesehatan hewan dan  
kualitas produknya**

Jumlah unit usaha  
peternakan yang  
terekomendasi NKV  
Persentase penyakit hewan  
menular yang tertangani  
sesuai dengan waktu  
tanggap

**Terwujudnya Pengendalian  
dan penanggulangan  
bencana pertanian**

Persentase Pengendalian  
dan Penanggulangan  
Bencana Peternakan

**Meningkatnya  
pengembangan usaha  
peternakan**

Persentase Peningkatan  
Jumlah Pengajuan  
Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya  
pendampingan usaha  
peternakan**

Persentase peningkatan  
peternak terampil



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
tangkap**

Jumlah produksi perikanan tangkap

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
budidaya**

Jumlah produksi perikanan konsumsi  
Jumlah produksi perikanan non konsumsi

**Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha kelautan  
dan perikanan**

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

**Meningkatnya  
pengolahan hasil produk  
perikanan**

Persentase pengolahan produk perikanan

**Optimalisasi Pengelolaan  
Penangkapan Ikan di  
Wilayah PUD (Perairan  
Umum Darat)**

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

**Meningkatnya  
Pemberdayaan  
Nelayan Kecil**

Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan

**Meningkatnya  
Penyelenggaraan Tempat  
Pelelangan Ikan (TPI)**

Jumlah Produksi Perikanan di TPI

**Terlaksananya  
Pendaftaran Kapal  
Perikanan**

Jumlah Kapal Perikanan yang terdaftar

Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu  
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia

Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap  
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia

Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil  
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil  
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya

Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 Gt  
Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan

Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap  
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia

Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Kepada Unit Usaha  
Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil  
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
tangkap**

Jumlah produksi perikanan tangkap

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
budidaya**

Jumlah produksi perikanan konsumsi  
Jumlah produksi perikanan non konsumsi

**Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha kelautan  
dan perikanan**

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

**Meningkatnya  
pengolahan hasil produk  
perikanan**

Persentase pengolahan produk perikanan

**Meningkatnya pemberdayaan  
Pembudidaya ikan Kecil**

Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan

**Meningkatnya Pengelolaan  
Pembudidayaan Ikan**

Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya

terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan

Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan

Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat

Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
tangkap**

Jumlah produksi perikanan tangkap

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
budidaya**

Jumlah produksi perikanan konsumsi  
Jumlah produksi perikanan non konsumsi

**Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha kelautan  
dan perikanan**

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

**Meningkatnya  
pengolahan hasil produk  
perikanan**

Persentase pengolahan produk perikanan

**Optimalisasi pengawasan  
sumber daya perikanan**

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi

**Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi**

Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota

**Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota**

Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota

**Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi**

Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

**Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya**

Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
tangkap**

Jumlah produksi perikanan tangkap

**Meningkatnya  
produksi perikanan  
budidaya**

Jumlah produksi perikanan konsumsi  
Jumlah produksi perikanan non konsumsi

**Meningkatnya kepatuhan  
pelaku usaha kelautan  
dan perikanan**

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

**Meningkatnya  
pengolahan hasil produk  
perikanan**

Persentase pengolahan produk perikanan

**Fasilitasi Penerbitan Tanda  
Daftar Usaha Pengolahan  
Hasil Perikanan bagi Usaha  
Skala Mikro dan Kecil**

Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

**Tersedianya Data dan Informasi  
Usaha Pemasaran dan  
Pengolahan Hasil Perikanan  
berdasarkan skala usaha dan  
risiko**

Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

**Optimalisasi Pembinaan Mutu  
dan Keamanan Hasil Perikanan  
Bagi Usaha Pengolahan dan  
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan

**Tertelaksananya pembinaan  
terhadap Penerapan  
Persyaratan Perizinan  
Berusaha Usaha Pengolahan**

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

**Meningkatnya penyediaan  
dan penyaluran bahan baku  
Industri Pengolahan Ikan**

Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan

**Meningkatnya  
Ketersediaan Ikan untuk  
Konsumsi dan Usaha  
Pengolahan**

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

**Tersedianya Fasilitas  
bagi Pelaku Usaha  
Perikanan Skala Mikro  
dan Kecil  
Kabupaten/Kota**

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan**  
Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

**Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan yang ada**  
Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi

**Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produknya**  
Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap  
Jumlah unit usaha peternakan yang terekomendasi NKV

**Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**  
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan

**Meningkatnya pengembangan usaha peternakan**  
Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya pendampingan usaha peternakan**  
Persentase peningkatan peternak terampil

**Meningkatnya Pengelolaan SDG Hewan**  
Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG

**Meningkatnya Kualitas SDG Hewan**  
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

**Termanfaatkannya SDG Hewan**  
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman

**Meningkatnya kualitas pakan yang beredar**  
Jumlah Bibit/pakan ternak yang diawasi

**Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak**  
Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar

**Optimalisasi Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**  
Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang diawasi

**Optimalisasi Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**  
Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar

**Meningkatnya penyediaan pakan ternak mandiri**  
Jumlah Unit Usaha pakan ternak yang dikendalikan dan diawasi

**Terawasinya Produksi Bahan Pakan/Pakan**  
Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan  
(daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan  
menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya  
ketersediaan  
sarana peternakan**

Persentase peningkatan  
penyediaan bibit  
ternak

**Meningkatnya  
pemanfaatan prasarana  
peternakan yang ada**

Persentase Prasarana  
Peternakan Layak  
Fungsi

**Meningkatnya status  
kesehatan hewan dan  
kualitas produknya**

Persentase penyakit hewan  
menular yang tertangani  
sesuai dengan waktu tanggap  
jumlah unit usaha  
peternakan yang  
terekomendasi NKV

**Terwujudnya Pengendalian  
dan Penanggulangan  
Bencana Pertanian  
Kabupaten/Kota**

Persentase Pengendalian  
dan Penanggulangan  
Bencana Peternakan

**Meningkatnya  
pengembangan usaha  
peternakan**

Persentase Peningkatan  
Jumlah Pengajuan  
Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya  
pendampingan usaha  
peternakan**

Persentase peningkatan  
peternak terampil

**Optimalisasi penyediaan  
prasarana peternakan yang  
layak fungsi**

Jumlah Prasarana Peternakan  
yang dibangun, dipelihara dan  
beroperasi

Terbangun, ter rehabilitasi,  
terpelihara dan beroperasinya  
rumah potong hewan

Jumlah rumah potong hewan  
yang dibangun, direhabilitasi  
dan dipelihara serta  
beroperasi

Terbangun, Ter rehabilitasi dan  
Terpeliharanya Prasarana  
Pertanian Lainnya

Jumlah Prasarana Pertanian  
Lainnya yang Dibangun,  
Direhabilitasi dan Dipelihara

Terbangun, Ter rehabilitasi dan  
Terpeliharanya Jalan Usaha  
Tani

Jalan Usaha Tani yang  
Dibangun, Direhabilitasi dan  
Dipelihara

Terbangun, ter rehabilitasi,  
terpelihara dan beroperasinya  
Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang  
dibangun, direhabilitasi dan  
dipelihara serta beroperasi

Terbangun, ter rehabilitasi dan  
terpeliharanya Sarana Prasarana  
Laboratorium Kesehatan Hewan dan  
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah Laboratorium Kesehatan  
Hewan dan Kesehatan  
Masyarakat Veteriner yang  
dibangun, direhabilitasi dan  
dipelihara



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan**

Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

**Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan yang ada**

Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi

**Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produknya**

Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap  
Jumlah unit usaha peternakan yang merekomendasi NKV

**Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan

**Meningkatnya pengembangan usaha peternakan**

Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya pendampingan usaha peternakan**

Persentase peningkatan peternak terampil

**Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan**

Persentase Kesehatan hewan yang dijamin

**Meningkatnya Penja Tertanggungnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menularminan Kesehatan Hewan**

Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali

**Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan**

Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan

**Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan**

Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

**Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan**

Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang diterbitkan

**Terwasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM**

Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM

**Optimalisasi Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner**

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola

**Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium**

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium

**Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner**

Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

**Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet

**Terwasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan**

Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

**Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Jumlah Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner

**Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi**

Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi

**Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**

Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan

**Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha**

Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan**

Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

**Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan yang ada**

Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi

**Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produknya**

Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap jumlah unit usaha peternakan yang terekomendasi NKV

**Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan

**Meningkatnya pengembangan usaha peternakan**

Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya pendampingan usaha peternakan**

Persentase peningkatan peternak terampil

**Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan**

Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan

**Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis**

Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

**Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan



# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

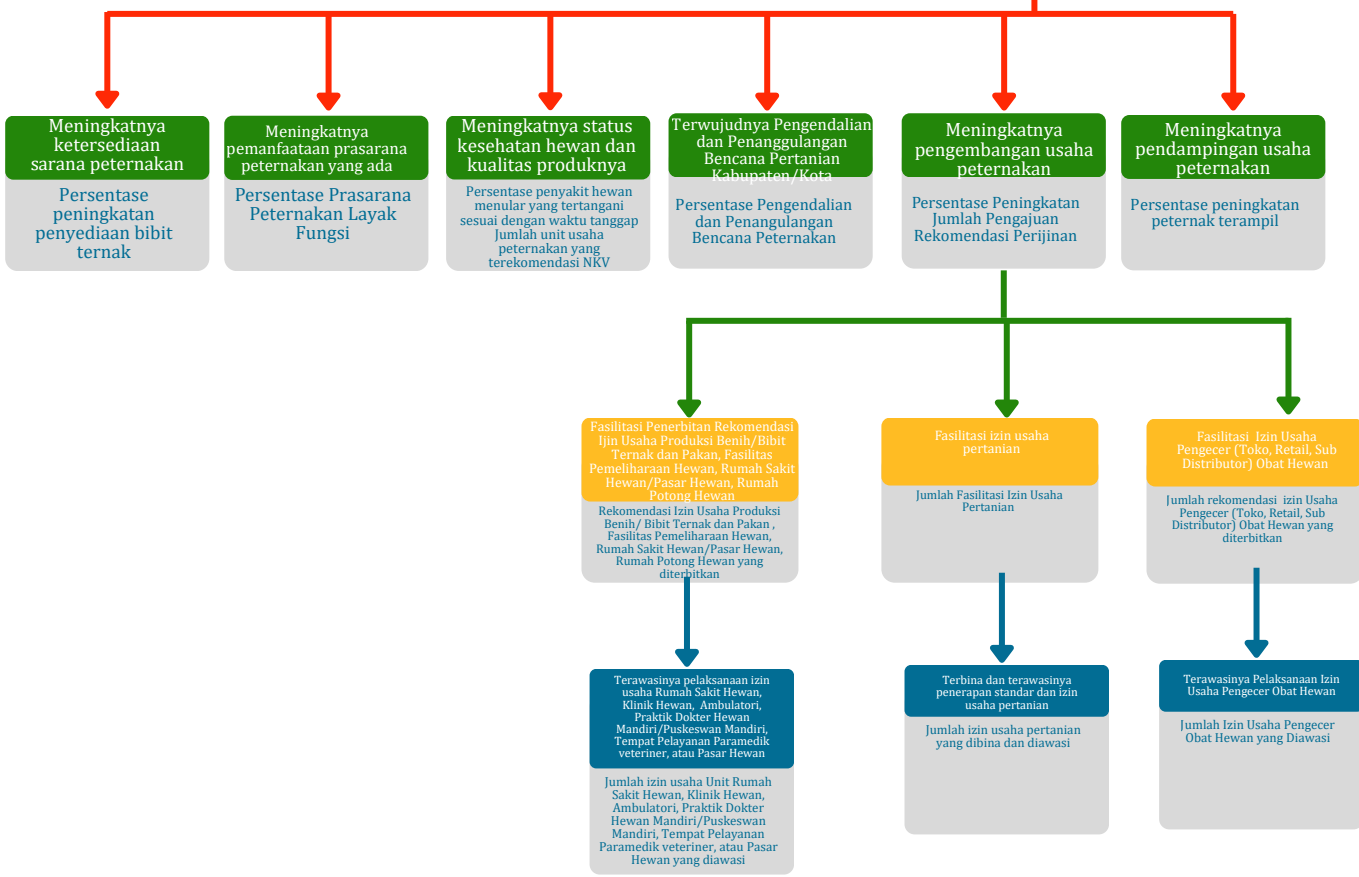
**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar





# Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

**Meningkatnya  
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Meningkatkan ekonomi masyarakat  
peternakan dan perikanan**

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB  
Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

CSF 1

**Meningkatnya produksi hasil  
perikanan**

Persentase peningkatan produksi perikanan  
1) Perikanan Tangkap  
2) Perikanan Budidaya (Konsumsi)  
3) Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)

CSF 2

**Meningkatnya produksi dan  
kualitas produk peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging, telur, susu)  
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)  
Persentase produk peternakan yang layak edar

**Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan**

Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

**Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan yang ada**

Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi

**Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produknya**

Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap  
Jumlah unit usaha peternakan yang terekomendasi NKV

**Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan

**Meningkatnya pengembangan usaha peternakan**

Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan

**Meningkatnya pendampingan usaha peternakan**

Persentase peningkatan peternak terampil

**Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Peternakan**

Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan

**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**

Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jln. Cokroaminoto No 22 Kepanjen Kidul Kota Blitar, Telp. (0342) 801136  
Pos-el : [disnakkan@blitarkab.go.id](mailto:disnakkan@blitarkab.go.id), Laman : [www.disnakkan.blitarkab.go.id](http://www.disnakkan.blitarkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : B/662.02/22/409.28.1/SK/2025  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BLITAR TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;  
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Mengingat

- 1.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar.
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
- kesatu : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan.

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 29 September 2025

Plt. Kepala Dinas Peternakan Dan  
Perikanan,



Heri Widyatmoko, Spt.  
Pembina Tk. I/IV-b  
NIP. 197201151998031006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Blitar

Nomor : B/662.02/22/409.28.1/SK/2025

Tanggal : 29 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran Pembangunan.	Inspektorat	Kepala Dinas
	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan			
			- Perikanan tangkap	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya.	Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$		
			- Perikanan budidaya (konsumsi)	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.  Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang Perikanan Budidaya	Kepala Dinas
			- Perikanan budidaya (non konsumsi)	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.  Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang Perikanan Budidaya	Kepala Dinas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			
			- Daging	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan	Kepala Dinas
			- Telur	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			- Susu	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Produksi thn } n - \text{produksi } n - 1}{\text{Produksi thn } n - 1} \times 100\%$		
			2. Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan total desa di Kabupaten Blitar Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah desa yang terkendali}}{\text{Jumlah total desa di Kabupaten Blitar}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Dinas
			3. Persentase Produk Peternakan	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi. Formulasi perhitungan:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Kepala Dinas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			yang Layak Edar	$\frac{\text{Jumlah produk layak edar}}{\text{Jumlah produk yang diawasi}} \times 100\%$	Masyarakat Veteriner	



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERI WIDYATMOKO, S.Pt

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten  
Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. RIJANTO, MM

Jabatan : Bupati Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 14 November 2025

Pihak Pertama

  
HERI WIDYATMOKO, S.Pt  
NIP. 197201151998031006

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan ( % ) - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya (konsumsi) - Perikanan Budidaya (non konsumsi/hias)	0,5 2,5 0,1
2	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%) - Daging - Telur - Susu Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar ( % ) Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis ( % )	3,95 3,4 1,4 98 93
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Angka)	73,6

Program	Anggaran	Keterangan
<b>Program Utama</b>		
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81.397.200	Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	251.412.200	
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.729.900	
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.731.150	
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	456.460.975	Urusan Pertanian Sub Sektor
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	263.758.050	Peternakan
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	351.755.925	
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	1.800.000	
9. Program Perizinan Usaha Pertanian	2.999.900	
10. Program Penyuluhan Pertanian	173.682.200	
<b>Program Penunjang</b>		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	10.829.015.343	Rutin
<b>Total</b>	<b>Rp 12.436.742.843,00</b>	

Bupati Blitar

  
**Drs. H. RIJANTO, MM**

Blitar, 14 November 2025  
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

  
**HERI WIDYATMOKO, S.P.**  
V b/ Pembina Tk. I  
NIP. 197201151998031006

**RENCANA AKSI PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		TARGET KEUANGAN			
			Bulan	Target			Bulan	Target			Bulan	Target			Bulan	Target	Bulan	Target	Bulan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	1		Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Ketentuan	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan (%)	1		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	1		1	180.000,00		
											2				2					
											3				3					
											4				4	310.000,00				
											5				5					
											6				6					
											7	2			7	490.000,00				
											8				8					
											9	1			9					
											10				10	384.550,00				
											11				11					
											12				12					
			2			2			2				1		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	1	1	1	144.000,00
													2				2			
													3	1			3			
													4				4	290.000,00		
													5				5			
													6				6			
													7				7	430.000,00		
													8				8			
													9				9			
													10				10	288.000,00		
													11				11			
													12	2			12			
			3			3			3	25%			1		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1	70	1	5.008.130.474,00
													2				2	77.693.250,00		
													3	70			3			
													4	70			4	1.664.472.956,00		
													5	70			5	554.165.000,00		
													6	70			6	13.845.600,00		
													7	70			7	825.669.713,00		
													8	87			8	33.115.700,00		
													9	87			9			
													10	87			10	707.775.324,00		
													11	87			11	397.929.783,00		
													12	87			12			
			4			4			4				1		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	1	20	1	
													2				2			
													3	20			3	5.085.000,00		
													4	20			4			
													5	20			5	5.085.000,00		
													6	20			6			
													7	20			7			
													8	20			8			
													9	20			9	5.085.000,00		
													10	20			10			
													11	20			11			
													12	30			12	5.085.000,00		
8										1		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (dokumen)	1	1	1				
										2				2						
										3				3	300.000,00					
										4				4						
										5				5						
										6	1			6	499.800,00					
										7				7						
										8				8						
										9				9						

5
6
7
8
9
10

73,6

5	6	50%	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan administrasi umum	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel (%)	9	25%	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan dan laporan SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	10		10	
					11		11					
					12	1	12					
					1	1	1					
					2	1	2					
					3	1	3	600.000,00				
					4	1	4					
					5	1	5					
					6	2	6	599.600,00				
					7	1	7					
					8	1	8					
					9	1	9					
6	7				1		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	10		10	
					11		11					
					12	2	12					
					1	1	1	14.977.250,00				
					2		2					
					3		3					
					4	1	4	672.000,00				
					5		5					
					6		6					
					7	1	7	475.500,00				
					8		8					
					9		9					
10	2	10	20.886.600,00									
11		11										
12		12										
7	8				1		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	10		10	
					11		11					
					12		12					
					1		1					
					2	1	2	19.491.250,00				
					3		3					
					4		4					
					5		5					
					6		6					
					7		7					
					8		8					
					9		9					
10	1	10	1.176.000,00									
11		11										
12		12										
8	9	75%			9	25%	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	10		10	
					11		11					
					12		12					
					1		1	35.449.850,00				
					2	10	2					
					3	10	3					
					4	10	4	18.763.803,00				
					5	10	5					
					6	10	6					
					7	10	7	7.500.000,00				
					8	10	8					
					9		9					
10	5	10	19.335.750,00									
11		11										
12		12										
9	10		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran	1		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	10		10	
					2		2					
					3		3					
					4	95%	4	33.804.580,00				
					5		5					
					6		6					
					7		7					
					8		8					
					9		9					
					10		10	47.809.520,00				
					11		11					
					12		12					
10			Meningkatnya Kualitas	Persentase Jasa Penunjang	1		Terlaksananya Penyediaan	Jumlah laporan penyediaan jasa	1	1	1	375.000,00
					2	1	2					

			11					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu			Jasa Surat Menyurat	surat menyurat (laporan)	3	1	3		
										2				4	1	4	1.184.250,00	
										3	20%			5	1	5		
										4				6	1	6		
														7	1	7	375.000,00	
														8	1	8		
														9	1	9		
														10	1	10	375.000,00	
														11	1	11		
														12	1	12		
										5		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1	1	58.525.513,00	
										6	20%			2	1	2		
										7				3	1	3		
										8				4	1	4	58.525.513,00	
										9				5	1	5		
										10				6	1	6		
										11				7	1	7	29.426.507,00	
										12				8	1	8		
														9	1	9		
														10	1	10	29.426.507,00	
														11	1	11		
														12	1	12		
			12							9	30%	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	1	249.862.050,00	
										10				2	1	2		
										11				3	1	3		
										12	30%			4	1	4	247.212.050,00	
														5	1	5		
														6	1	6		
														7	1	7	114.249.550,00	
														8	1	8		
														9	1	9		
														10	1	10	250.930.550,00	
														11	1	11		
														12	1	12		
								Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	1		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	1	64.512.000,00	
										2				2		2		
										3	30%			3		3		
										4				4	1	4	39.655.000,00	
										5				5		5		
										6	20%			6		6		
										7		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	7	3	7	4.150.000,00	
										8				8		8		
										9				9		9		
										10				10	7	10	125.605.000,00	
										11				11		11		
										12	20%			12		12		
														1	4	1	5.280.000,00	
														2		2		
														3		3		
														4		4		
														5		5		
														6		6		
														7		7		
														8		8		
														9		9		
														10	2	10	21.350.000,00	
														11		11		
														12		12		
2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan - Perikanan Tangkap (%)			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1	296	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	1		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1		1	
			1							2				2		2		
			2							3				3		3		
			3							4				4		4	880.000,00	
			4							5				5		5		
			5							6				6		6		



						12	172,5 Ton			12	1		12	
				Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1		Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (rekomendasi)	1			1	
		12	149			2		ya		2			2	
						3		Rekomendasi		3			3	
						4		Tanda Daftar		4			4	
						5		Kapal		5			5	480.000,00
						6		Perikanan		6			6	
						7				7			7	320.000,00
						8				8			8	490.000,00
						9				9			9	
						10				10			10	
						11	4 unit kapal			11	34		11	
						12				12			12	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan konsumsi (ton)	1	1484	Meningkatnya Pembudayaan Pembudidaya ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	1		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	1			1	
		2	1484			2				2			2	
		3	1484			3				3			3	999.000,00
		4	1484			4				4	2		4	74.640.500,00
		5	1483			5				5			5	558.500,00
		6	1483			6				6	2		6	77.320.000,00
		7	1483			7				7			7	8.796.750,00
		8	1483			8				8			8	
		9	1483			9				9			9	
		10	1483			10				10			10	
		11	1483			11				11			11	
		12	1417			12				12			12	
	Jumlah produksi perikanan non konsumsi/hias (ekor)	1	17.073.407			5		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan pengembangan kelembagaan (kelompok)	1			1	
		2	17.073.407			6				2	1		2	1.500.000,00
		3	17.073.407			7	20			3			3	
		4	17.073.407			8	100			4	1		4	1.500.000,00
		5	17.073.407			9				5			5	
		6	17.073.407			10				6	1		6	1.500.000,00
		7	17.073.407			11				7			7	
		8	17.224.423			12				8	1		8	1.500.000,00
		9	17.073.407							9			9	
		10	17.073.407							10	1		10	1.500.000,00
		11	17.073.407							11			11	
		12	17.073.407							12			12	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	1	6	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1			1	
						2	6			2			2	
						3	6			3			3	
										4			4	2.560.000,00
										5			5	
										6			6	
										7			7	
										8			8	
										9			9	
										10			10	20.000,00
										11			11	
										12	1		12	
								Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	1			1	
										2			2	
										3			3	
										4	1		4	4.000.000,00

						4	6	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (unit)	5		5		
						5	6			6		6		
						6	6	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	1	5	1		
						7	6	Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	2	5	2	640.000,00	
						8	6			3	5	3	2.755.000,00	
						9	6			4	5	4	640.000,00	
						10	6			5	5	5	12.829.400,00	
						11	6			6	5	6	2.435.000,00	
						12	6			7	5	7		
						13	6			8	5	8	1.410.000,00	
						14	6			9	5	9		
						15	6			10	5	10		
						16	6			11	5	11	1.410.000,00	
						17	6			12	5	12	600,00	
						18	6	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	1		1		
						19	6			2	2	2	37.000.000,00	
						20	6			3		3		
						21	6			4		4		
						22	6			5		5		
						23	6			6		6		
						24	6			7		7		
						25	6			8		8		
						26	6			9		9		
						27	6			10		10		
						28	6			11		11		
						29	6			12		12		
						30	6	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (unit)	1		1		
						31	6			2		2		
						32	6			3		3		
						33	6			4		4		
						34	6			5		5		
						35	6			6		6		
						36	6			7	30	7	10.497.450,00	
						37	6			8		8	2.900.000,00	
						38	6			9		9		
						39	6			10		10		
						40	6			11		11		
						41	6			12		12		
Meningkatnya produksi PUD (Perairan Umum Darat)	Peningkatan prosentase produksi PUD (Perairan Umum Darat) (%)	1	5	Optimalisasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	1		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	1		1		
		2					2				2		2	
		3					3				3		3	
		4					4				4		4	
		5					5	4			5		5	
		6					6				6		6	
		7					7				7		7	39.900,00
		8					8				8		8	
		9					9				9	12	9	2.400.000,00
		10					10				10		10	
		11					11				11		11	
		12				12				12		12		
		13				13		Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1		1		
		14				14	8			2		2		
		15				15	8			3		3		
		16				16	12			4	4	4		
		17				17				5	4	5	480.000,00	
		18				18				6		6		
		19				19				7		7		
		20				20				8	8	8	810.000,00	
		21				21				9		9		

						**					Waduk, Rawa, dan Genangan Air		10		10		
						12							11		11		
													12		12		
				Meningkatnya pengolahan produk perikanan	Persentase pengolahan hasil perikanan (%)	1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1		1	
						2				2			2		2		
						3				3			3		3		
						4				4			4		4		
						5				5			5		5	1.540.000,00	
						6				6			6		6		
						7				7			7		7		
						8				8			8		8		
						9				9			9		9		
						10				10			10		10	960.000,00	
						11				11	1		11		11		
						12				12			12		12		
						1		Optimalisasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	1		Terlaksananya pembinaan terhadap persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap persyaratan Perizinan Berusaha Pada	1		1	
						2				2			2		2		
						3				3			3		3		
						4				4			4		4		
						5				5			5		5	480.000,00	
						6				6			6		6		
						7				7			7		7		
						8				8			8		8	480.000,00	
						9				9	26		9	21	9		
						10				10			10		10		
						11				11			11		11	510.000,00	
						12				12			12		12		
						1		Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	1		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		1	
						2				2			2		2	480.000,00	
						3				3			3		3		
						4				4			4		4	480.000,00	
						5				5			5		5		
						6				6			6		6		
						7				7			7		7		
						8				8			8		8	11.361.000,00	
						9				9			9		9		
						10				10			10		10	160.000,00	
						11				11			11		11	3.360.150,00	
						12				12	31		12		12		
						1				1			1		1		
						2				2			2		2		
						3				3			3		3	10.769.000,00	
						4				4			4		4		
						5				5			5		5		
						6				6			6		6	900.000,00	
						7				7			7		7		
						8				8			8		8		
						9				9			9		9		
						10				10			10	3	10	40.230.000,00	
						11				11			11		11		
						12				12	105		12		12		
3	Meningkatnya produksi dan kualitas peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas (%)		Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan	Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak	1		Meningkatnya Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	1	2	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1		1	
		- Daging	1			2				2	2		2		2		
			2			3				3	2		3		3		
			3			4				4	2		4		4		
			4			5				5	2		5		5		
			5			6				6	2		6		6		
			6			7				7	2		7		7		
			7			8				8	2		8		8		
			8			9				9	2		9		9		
			9			10				10	2		10		10		
			10			11				11	2		11		11		
			12		0,3	12				12	2		12		12		



							Pertanian Lainnya	Dipelihara	6	6	
									7	7	1.280.000,00
									8	8	
									9	9	
									10	10	
									11	11	43.114.300,00
									12	2	12
Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produknya	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	1	Meningkatnya	Persentase Kesehatan hewan yang dijamin	1	80%	Tertanggulangnya Daerah Wabah yang Terkendali	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1	1	320.000,00
		2	Penjaminan Kesehatan Hewan,		2				2	2	975.000,00
		3	Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		3				3	2	
		4			4				4	4	800.000,00
		5			5				5	5	410.000,00
		6			6				6	2	74.400,00
		7			7				7	7	1.210.000,00
		8			8				8	8	
		9			9				9	2	
		10			10				10	10	
		11			11				11	11	
		12	94		12				12	12	
	Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi	1					Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1	1	
		2							2	2	
		3							3	3	120.000,00
		4							4	4	
		5							5	5	
		6							6	6	
		7							7	1	820.000,00
		8							8	8	
		9							9	9	
		10							10	10	
		11							11	11	
		12	35						12	12	
							Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1	1	
									2	2	640.000,00
									3	3	
									4	4	686.800,00
									5	5	
									6	2	
									7	7	320.000,00
									8	8	
									9	9	
									10	10	
									11	3	793.200,00
									12	12	
							Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1	5	
									2	5	600.000,00
									3	5	
									4	5	1.200.000,00
									5	5	1.000.000,00
									6	5	
									7	6	1.040.000,00
									8	6	
									9	7	
									10	7	
									11	7	
									12	7	
							Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	5	
									2	5	2.060.000,00
									3	5	3.260.000,00
									4	5	
									5	5	3.520.000,00
									6	5	
									7	5	
									8	4	1.660.000,00
									9	4	1.040.000,00
									10	4	

						6	51					11	4		11	20.000.000,00
												12	4		12	
						7	52	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1	40		1	
												2	40		2	3.000.000,00
						8	52					3	40		3	98.721.800,00
												4	40		4	92.491.600,00
						9	52					5	40		5	1.338.000,00
												6	45		6	3.800.000,00
						10	52					7	45		7	500.000,00
												8	45		8	500.000,00
						11	52					9	45		9	
												10	40		10	
						12	52					11	40		11	82.603.150,00
												12	40		12	
						1		Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan		1		1	
												2			2	300.350,00
						2						3			3	
						3						4			4	459.400,00
						4						5			5	
						5						6	5		6	
						6	10					7	5		7	1.120.000,00
												8	5		8	
						5						9	5		9	
						6	10					10			10	
												11			11	
						7	10	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan higiene sanitasi		1			1	
						8	10					2			2	
						9	10					3			3	1.120.000,00
						10						4			4	
												5			5	
						11						6	5		6	
												7	5		7	410.000,00
						10						8	5		8	
												9	5		9	
						11						10			10	
						12						11			11	
												12			12	
						1		Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah lokasi yang diawasi peneraan dan pengawasn	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan		1		1	
						2						2			2	588.500,00
						3						3			3	
						4						4			4	
						5						5			5	
						6	3.360					6	248		6	22.253.725,00
						7						7			7	
						8						8			8	
						9						9			9	
						10						10			10	
						11						11			11	
						12						12			12	
Optimalisasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan		1	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	1		Tertanggulnginya Bencana Non Bersifat Zoonosis	Jumlah wilayah penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis			1			1	500.000,00
			2			2						2			2	
			3			3						3			3	800.000,00
			4			4	1					4	1		4	500.000,00
			5			5						5			5	
			6			6						6			6	
			7			7						7			7	
			8			8						8			8	
			9			9						9			9	
			10			10						10			10	
			11			11						11			11	
			12	100%		12						12			12	
Meningkatnya pengembangan usaha	Persentase Peningkatan Jumlah		1	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Produksi	Rekomendasi Izin Usaha Produksi	1		Terawasinya pelaksanaan izin usaha	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik			1			1	2.400.000,00
			2			2						2			2	
			3			3						3			3	

peternakan	Pengajuan Rekomendasi Perijinan	4		Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	4		Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan	Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan	4		4	320.000,00		
		5				5				5		5			
		6				6				6		6	279.900,00		
		7				7				7		7			
		8				8				8		8			
		9				9				9		9			
		10				10	1		Dokter	Tempat	10	5	10		
		11				11	1		Hewan	Pelayanan	11	5	11		
		12	5%	Potong Hewan	Potong Hewan	12			Mandiri/Pus	Paramedik	12		12		
		Meningkatnya penyuluhan/ pendampingan usaha peternakan	Persentase peningkatan peternak terampil	1		Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	1		Terlaksananya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		1	
				2				2		a		2		2	2.830.000,00
				3				3		Pengembang		3		3	2.830.000,00
4						4		an Kapasitas		4		4	1.230.000,00		
5						5		Kelembagaan		5		5	3.131.750,00		
6						6		Petani di		6		6	86.357.600,00		
7						7	50	Kecamatan		7	4	7	13.213.750,00		
8						8	50	dan Desa		8	4	8	1.600.000,00		
9						9	45			9	2	9	1.600.000,00		
10						10				10		10	1.500.000,00		
11						11				11		11	59.389.100,00		
12	10%					12				12		12			